

LAPORAN KEUANGAN



2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
ASERSI FINAL



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
A.1. DASAR HUKUM	9
A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9
A.3. RENCANA STRATEGIS	12
A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	17
A.5. BASIS AKUNTANSI	17
A.6. DASAR PENGUKURAN	18
A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI	18
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	25
B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	25
B.2. BELANJA NEGARA	27
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	28
B.2.2. BELANJA BARANG	29
B.2.3. BELANJA MODAL	31
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	32
C.1. ASET LANCAR	32
C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	32
C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	33
C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA	33
C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK	33

C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK	33
C.1.6. PERSEDIAAN	34
C.2. ASET TETAP	34
C.2.1. PERALATAN DAN MESIN	35
C.2.2. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	36
C.2.3. ASET TETAP LAINNYA	37
C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	37
C.3. ASET LAINNYA	37
C.3.1. ASET TAK BERWUJUD	37
C.3.2. ASET LAIN-LAIN	38
C.3.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	39
C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39
C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	40
C.4.2. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	40
C.5. EKUITAS	40
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	41
D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	41
D.2. BEBAN PEGAWAI	41
D.3. BEBAN PERSEDIAAN	42
D.4. BEBAN BARANG DAN JASA	42
D.5. BEBAN PEMELIHARAAN	44
D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS	44
D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	45
D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	45
D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	46
D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL	46
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	48
E.1. EKUITAS AWAL	48
E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO	48
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	48
E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS	48
E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	48
E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	49
E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR	49

E.5.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	50
E.6. EKUITAS AKHIR	50
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	51
F.1. REKENING PEMERINTAH	51
F.2. REALISASI PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	51
F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	52
F.3.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA	52
F.3.2. TRANSFER KELUAR	52
F.3.3. TRANSFER MASUK	52
F.3.4. INFORMASI TUNGGAKAN PEMBAYARAN TA 2022	52
F.3.5. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN	53
F.3.6. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI	53
F.3.7. INFORMASI TUNTUTAN HUKUM	55
LAMPIRAN PENDUKUNG	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	2
Tabel 3 Kualitas Piutang	20
Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap	22
Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	23
Tabel 6 Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2022	25
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022	26
Tabel 8 Perbandingan Rincian Realisasi PNBK 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	26
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2022	27
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022	27
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	28
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	29
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	30
Tabel 14 Belanja barang untuk Penanganan Pandemi Covid 19	31
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	32
Tabel 16 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	32
Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar Dimuka	33
Tabel 18 Rincian Persediaan	34
Tabel 19 Rincian Aset Tetap	35
Tabel 20 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin	35
Tabel 21 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin	36
Tabel 22 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin	36
Tabel 23 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	37
Tabel 24 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2022	38
Tabel 25 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022	38
Tabel 26 Mutasi Aset Lain-Lain	39
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022	39
Tabel 28 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	40
Tabel 29 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	41
Tabel 30 Rincian Beban Pegawai	42
Tabel 31 Rincian Beban Persediaan	42

Tabel 32 Rincian Beban Barang dan Jasa	43
Tabel 33 Rincian Barang Jasa Penanganan Pandemi	44
Tabel 34 Rincian Beban Pemeliharaan	44
Tabel 35 Rincian Beban Perjalanan Dinas	45
Tabel 36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	46
Tabel 37 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	46
Tabel 38 Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	47
Tabel 39 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas	49
Tabel 40 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	49
Tabel 41 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DDEL)	49
Tabel 42 Rincian Transfer Keluar	50
Tabel 43 Rincian Pengesahan Hibah	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP Atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian s.d 31 Desember 2022
Lampiran II	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran III	Daftar Rincian Pengembalian Belanja Pegawai
Lampiran IV	Daftar Rincian Utang Pihak Ketiga
Lampiran V	Daftar Saldo Utang Pajak Belum Disetor
Lampiran VI	Daftar Rincian Piutang Bukan Pajak
Lampiran VII	Laporan Pendukung



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2023
Inspektur



Mirza S. Mashudi

EXECUTIVE SUMMARY

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.802.322.673,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp434.688.843.042,00 atau sebesar 99,06% dari alokasi anggaran sebesar Rp438.832.116.000,00.

Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Negara dan Hibah	-	1.802.322.673		-	1.162.464.429	-
2	Belanja Negara	438.832.116.000	434.688.843.042	99,06%	395.696.324.000	386.793.046.903	97,75%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal pelaporan. Nilai Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.849.360.962,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp607.154.212,00, Aset Tetap sebesar Rp20.226.931.500,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp2.015.275.250,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.497.508.762,00 dan Rp22.849.360.962,00.

Ringkasan perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dengan Neraca 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar	607.154.212	710.395.785	(103.241.573)	(14,53%)
Aset Tetap	20.226.931.500	20.606.701.257	(379.769.757)	(1,84%)
Aset Lainnya	2.015.275.250	2.952.709.950	(937.434.700)	(31,75%)
Jumlah Aset	22.849.360.962	24.269.806.992	(1.420.446.030)	(5,85%)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	5.497.508.762	5.153.692.713	343.816.049	6,67%
Ekuitas Dana			0	
Ekuitas	17.351.852.200	19.116.114.279	(1.764.262.079)	(9,23%)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	22.849.360.962	24.269.806.992	(1.420.446.030)	(5,85%)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp457.231.389.167,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp457.231.389.167,00. Terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.668.149.178,00. Sedangkan untuk Pos-Pos Luar Biasa bersaldo nihil, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp455.563.239.989,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp19.116.114.279,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp455.563.239.989,00, dikurangi koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp115.924.476,00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp453.914.902.386,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp17.351.852.200,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22		% thd Angg	31-Dec-21
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1		1.802.322.673	-	1.162.464.429
JUMLAH PENDAPATAN			1.802.322.673	-	1.162.464.429
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	110.280.097.000	108.957.180.694	98,80%	105.392.362.716
Belanja Barang	B.2.2	320.629.879.000	317.822.278.186	99,12%	272.861.812.750
Belanja Modal	B.2.3	7.922.140.000	7.909.384.162	99,84%	8.538.871.437
JUMLAH BELANJA		438.832.116.000	434.688.843.042	99,06%	386.793.046.903

- Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp434.688.843.042,00 atau sebesar 99,06% dari total pagu anggaran setelah dikurangi pengembalian belanja.
- Sedangkan realisasi belanja per 31 Desember 2021 adalah Rp386.793.046.903,00 atau sebesar 97,75% dari pagu anggaran Rp395.696.324.000,00.

Jakarta, Mei 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

II. NERACA

NERACA
PER 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	44.062.407	50.288.257
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	71.841.633	102.210.630
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	8.358.819	88.570.238
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.5	(41.795)	(442.851)
Persediaan	C.1.6	482.933.148	469.769.511
JUMLAH ASET LANCAR		607.154.212	710.395.785
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	90.851.248.452	83.623.800.130
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.2	2.214.385.347	2.092.285.347
Aset Tetap Lainnya	C.2.3	547.639.287	547.639.287
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(73.386.341.586)	(65.657.023.507)
JUMLAH ASET TETAP		20.226.931.500	20.606.701.257
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	9.282.906.227	9.028.538.427
Aset Lain-Lain	C.3.2	9.532.108.295	13.144.604.725
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(16.799.739.272)	(19.220.433.202)
JUMLAH ASET LAINNYA		2.015.275.250	2.952.709.950
JUMLAH ASET		22.849.360.962	24.269.806.992
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	5.489.227.155	5.149.007.713
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.2	8.281.607	4.685.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.497.508.762	5.153.692.713
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	17.351.852.200	19.116.114.279
JUMLAH EKUITAS		17.351.852.200	19.116.114.279
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.849.360.962	24.269.806.992

Jakarta, Mei 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

III. LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBPN Lainnya	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	108.618.302.334	105.227.710.960
Beban Persediaan	D.3	4.457.875.547	4.732.239.494
Beban Barang dan Jasa	D.4	212.343.338.230	323.965.848.155
Beban Pemeliharaan	D.5	13.128.995.299	17.115.089.880
Beban Perjalanan Dinas	D.6	107.732.136.167	82.238.673.327
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.7	1.220.362.973	1.312.758.326
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	9.730.779.673	10.252.582.040
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(401.056)	210.058
Beban Lain-Lain			
JUMLAH BEBAN		457.231.389.167	544.845.112.240
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(457.231.389.167)	(544.845.112.240)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		1.457.074.326	806.569.611
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		211.074.852	8.911.951
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		1.668.149.178	815.481.562
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(455.563.239.989)	(544.029.630.678)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT LO		(455.563.239.989)	(544.029.630.678)

Jakarta, Mei 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	19.116.114.279	21.360.406.552	(2.244.292.273)	(10,507)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(455.563.239.989)	(544.029.630.678)	88.466.390.689	(16,261)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(115.924.476)	(66.669.695)	(49.254.781)	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		(115.924.476)	(142.268.695)	26.344.219	-
Koreksi Lain-Lain		-	75.599.000	(75.599.000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	453.914.902.386	541.852.008.100	(87.937.105.714)	(16,229)
KENAIKAN PENURUAN EKUITAS		(1.764.262.079)	(2.244.292.273)	480.030.194	(21,389)
EKUITAS AKHIR	E.6	17.351.852.200	19.116.114.279	(1.764.262.079)	(9,229)

Jakarta, Mei 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

Entitas

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Profil

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Oktober 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Pada tahun 2020 terdapat pergantian kabinet yang baru dan menyebabkan perubahan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyesuaikan rekomendasi restrukturisasi organisasi, berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

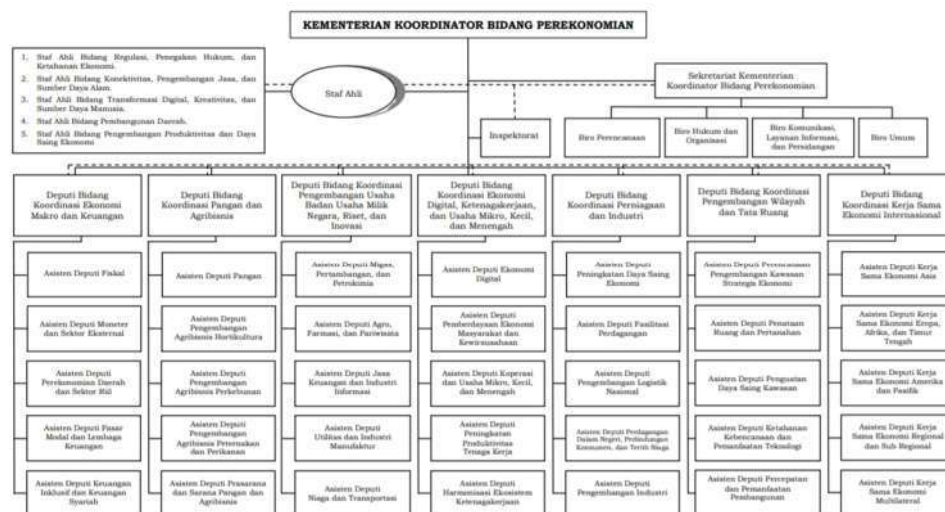
- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2021 sesuai hal tersebut di atas, maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 28 Oktober 2021. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- i. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam;
- k. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia;
- l. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi; dan
- n. Inspektorat.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.3. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2021-2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2021-2024 adalah **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi-misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan akses pada seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan serta peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antar generasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2021 - 2024.

Visi Presiden-Wakil Presiden 2021-2024 tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden-Wakil Presiden yang meliputi:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga**
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan**

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke 1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

- 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;**
- 2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;**

3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui Misi/Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari visi, misi, dan tujuan diatas terdapat kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diantaranya:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas,	Pertumbuhan Ekonomi

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
2.	Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan	Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	Tingkat Inflasi yang Terjaga dalam Rentang Target
3.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan		Defisit Transaksi Berjalan/PDB yang Menurun
4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian		
5.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2022, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

A.5. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber. .

(3) Belanja

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, Piutang diakui apabila

menenuhi kriteria sebagai berikut: Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah];
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

d. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

e. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

f. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan
atas Pos
Laporan
Realisasi
Anggaran*

Kemenko Bidang Perekonomian memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp444.900.394.000,00. Selama tahun 2022, dilakukan revisi atas DIPA Awal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Berikut ini adalah perubahan revisi terkait dengan pagu anggaran Kemenko Bidang Perekonomian:

Tabel 6
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2022

Uraian	2022	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	120.720.312.000	110.280.097.000
Belanja Barang	318.657.942.000	320.629.879.000
Belanja Modal	5.522.140.000	7.922.140.000
Jumlah Belanja	444.900.394.000	438.832.116.000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp10.440.215.000,00, penambahan belanja barang sebesar Rp1.971.937.000,00, dan penambahan belanja modal sebesar Rp2.400.000.000,00.

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp1.802.322.673*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.802.322.673,00, tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.457.074.326	-
2	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	25.989.852	
3	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	317.408.495	
4	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	-	1.850.000	
Jumlah		-	1.802.322.673	-

Realisasi PNBPN per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp639.858.244,00 atau naik sebesar 55,04% dibandingkan realisasi PNBPN pada 31 Desember 2021. Perbandingan realisasi PNBPN disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Perbandingan Rincian Realisasi PNBPN
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	31-Dec	31-Dec	Kenaikan (Penurunan)	
		TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	1457.074.326	1030.819.404	426.254.922	41,35%
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	46.000.000	(46.000.000)	(100,00%)
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	25.989.852	190.051	25.799.801	13575,20%
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	317.408.495	85.454.974	231.953.521	27143%
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.850.000	-	1.850.000	100,00%
Jumlah		1.802.322.673	1.162.464.429	639.858.244	55,04%

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN merupakan penerimaan atas penjualan kendaraan bermotor sesuai risalah lelang nomor 158/25/2022 tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp1.457.074.326,00. Informasi mengenai aset yang dilelang dapat dilihat pada laporan pendukung;
- Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL atas kelebihan gaji pegawai tahun 2021 sebesar Rp25.989.852;
- Penerimaan kembali belanja barang TAYL terdiri atas honor tim, perjadiin, PPNN, temuan APIP dan BPK sebesar Rp317.408.495,00;
- Penerimaan kembali belanja modal TAYL atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.850.000,00.

B.2.BELANJA NEGARA

*Realisasi Belanja
Negara
Rp434.688.843.042*

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp434.688.843.042,00 atau mencapai 99,06% dari alokasi anggaran sebesar Rp438.832.116,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari transaksi kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp211.667.571,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2022

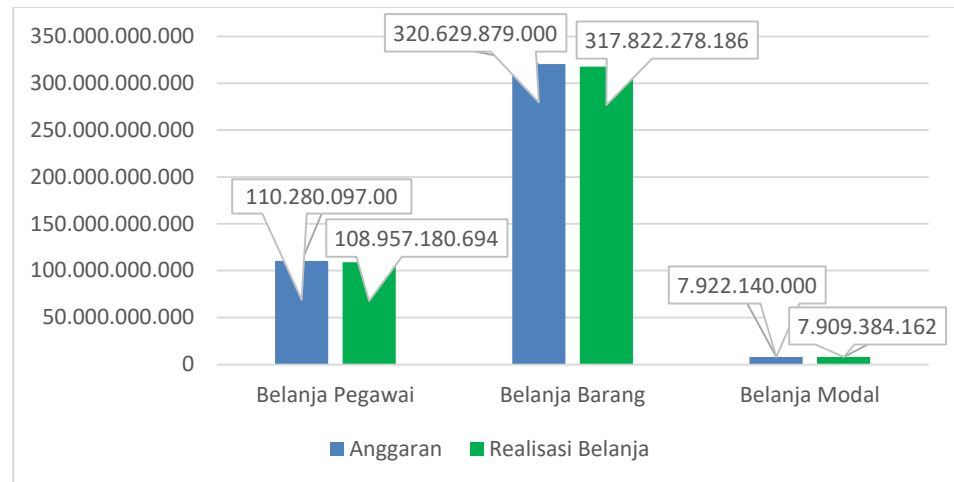
Kode Program	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja Netto	(%)	Pengembalian Belanja
WA	Program Dukungan Manajemen	228.830.094.000	226.061.652.157	98,79%	110.278.498
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	210.002.022.000	208.627.190.885	99,35%	101.389.073
Jumlah		438.832.116.000	434.688.843.042	99,06%	211.667.571

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2022, seluruhnya bersumber dari dana Rupiah Murni sebesar Rp434.688.843.042,00. Berdasarkan jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	%
51	Belanja Pegawai	110.280.097.000	108.957.180.694	1.322.916.306	98,80%
52	Belanja Barang	320.629.879.000	317.822.278.186	2.807.600.814	99,12%
53	Belanja Modal	7.922.140.000	7.909.384.162	12.755.838	99,84%
Jumlah Belanja		438.832.116.000	434.688.843.042	4.143.272.958	99,06%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja periode Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Persentase realisasi atas jenis belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2022 paling tinggi adalah belanja modal yakni 99,84% atau sebesar Rp7.909.384.162,00 dari pagu anggaran belanja modal sebesar Rp7.922.140.000,00. Adapun untuk belanja pegawai terealisasi senilai 98,80% atau sebesar Rp108.957.180.694,00, sedangkan belanja barang sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi 99,12% atau sebesar Rp317.822.278.186,00.

Perbandingan realisasi belanja pada periode Semester II Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)	
		31-Dec TA 2022	31-Dec TA 2021
51	Belanja Pegawai	108.957.180.694	105.392.362.716
52	Belanja Barang	317.822.278.186	272.861.812.750
52	Belanja Modal	7.909.384.162	8.538.871.437
Jumlah		434.688.843.042	386.793.046.903

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai
Rp108.957.180.694

Pada periode anggaran sampai dengan 31 Desember 2022, pagu Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 98,80% atau sebesar Rp108.957.180.694,00 dari pagu sebesar Rp110.280.097.000,00. Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai adalah akun belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai, yang terealisasi sebesar 99,19% dari total pagu kelompok belanja dimaksud. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021, dengan capaian masing-masing sebesar Rp108.957.180.694,00 dan

Rp105.392.362.716,00 atau naik sebesar 3,38%. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dikarenakan terdapat penerimaan pegawai baru pada tahun 2022 dan pembayaran komponen tunjangan kinerja sebesar 50% pada saat pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13. Adapun Pengembalian Belanja Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp95.330.773,00 dan Rp49.975.737,00 dapat dilihat pada Lampiran III. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-22			Realisasi 31 Des	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%	Tahun 2021	Naik (turun)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	27.747.705.000	27.614.745.199	99,52%	26.149.775.780	1.464.969.419	5,60%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	783.000	422.648	53,98%	460.816	(38.168)	(8,28%)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.622.920.000	1.594.082.576	98,22%	1.525.806.970	68.275.606	4,47%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	419.365.000	411.728.976	98,18%	394.235.994	17.492.982	4,44%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4.236.580.000	4.176.260.000	98,58%	4.956.090.000	(779.830.000)	(15,73%)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	771.500.000	713.845.000	92,53%	403.425.000	310.420.000	76,95%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	242.000.000	228.818.833	94,55%	268.805.980	(39.987.147)	(14,88%)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.394.113.000	1.368.448.350	98,16%	1.328.931.240	39.517.110	2,97%
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.608.784.000	4.309.273.000	93,50%	4.745.763.000	(436.490.000)	(9,20%)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	901.390.000	882.580.000	97,91%	840.600.000	41.980.000	4,99%
511152	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	307.250.000	306.250.000	99,67%	262.500.000	43.750.000	16,67%
512211	Belanja Uang Lembur	132.580.000	102.798.000	77,54%	93.177.000	9.621.000	10,33%
512411	Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	67.895.127.000	67.343.258.885	99,19%	64.472.766.673	2.870.492.212	4,45%
Pengembalian Belanja Pegawai			(95.330.773)	-	(49.975.737)	(45.355.036)	90,75%
Jumlah Kelompok Belanja Pegawai		110.280.097.000	108.957.180.694	98,80%	105.392.362.716	3.564.817.978	3,38%

B.2.2. BELANJA BARANG

*Realisasi Belanja
Barang
Rp317.822.278.186*

Pada periode 31 Desember 2022, pagu Belanja Barang telah terealisasi sebesar 99,12% atau sebesar Rp317.822.278.186,00 dari pagu sebesar Rp320.629.879.000,00.

Persentase realisasi terbesar pada Belanja Barang terdapat pada akun Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya sebesar Rp6.938.709.414,00 atau 99,96% dari total pagu akun Langganan Daya dan Jasa Lainnya sebesar Rp6.941.303.000,00. Persentase realisasi terbesar kedua Belanja Barang merupakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang terealisasi sebesar 99,94% atau sebesar Rp9.124.854.040,00 dari pagu sebesar Rp9.130.314.000,00.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2022 jika dibandingkan 31 Desember 2021, dengan capaian realisasi masing-masing adalah sebesar Rp317.822.278.186,00 dan Rp272.861.812.750,00. Perbandingan persentase penurunan realisasi yang paling besar terdapat pada belanja perjalanan dinas Penanganan Pandemi Covid-19 yakni 100% atau sebesar Rp18.430.000,00.

Adapun Pengembalian Belanja Barang pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp116.336.798,00 dan Rp2.112.422.919,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kode Akun	Uraian	31-Dec-22			Realisasi 31 Des 2021	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%		Naik (turun)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6.182.214.000	6.132.900.704	99,20%	7.592.473.823	(1.459.573.119)	(19,22%)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31853.000	22.974.125	72,13%	21892.000	1082.125	4,94%
521115	Belanja Honor Operasional Satker	1515.652.000	1508.084.000	99,50%	1411440.500	96.643.500	6,85%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.656.019.000	2.597.546.169	97,80%	2.587.683.606	9.862.563	0,38%
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	2.996.031.000	2.972.464.088	99,21%	4.480.570.415	(1.508.106.327)	(33,66%)
521211	Belanja Bahan	9.565.969.000	9.263.271.396	96,84%	6.428.591.264	2.834.680.132	44,09%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.643.649.000	5.630.130.000	99,76%	6.037.220.000	(407.090.000)	(6,74%)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1231960.000	1228.040.284	99,68%	1242.237.011	(14.196.727)	(1,14%)
521241	Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	991000.000	987.423.705	99,64%	3.706.259.266	(2.718.835.561)	(73,36%)
521252	Belanja Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptabel	20.000.000	4.456.650	22,28%	-	4.456.650	100,00%
521311	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.109.621.000	4.027.692.797	98,01%	3.755.463.300	272.229.497	7,25%
521332	Belanja Barang Persediaan Lainnya	477.000.000	464.682.439	97,42%	133.069.557	331612.882	249,20%
521341	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	305.000.000	297.645.100	97,59%	113153.800	(833.868.700)	(73,69%)
522111	Belanja Langganan Listrik	3.980.521.000	3.975.704.760	99,88%	2.156.681.150	1.819.023.610	84,34%
522112	Belanja Langganan Telepon	84.005.000	79.801.345	95,00%	86.407.640	(6.606.295)	(7,65%)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.941.303.000	6.938.709.414	99,96%	7.059.260.219	(120.550.805)	(1,71%)
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2.510.000	2.505.800	99,83%	1705.500	800.300	46,92%
522131	Belanja Jasa Konsultan	10.251.993.000	10.231.895.121	99,80%	8.588.701.250	1.643.193.871	19,13%
522141	Belanja Sewa	56.992.634.000	56.906.755.496	99,85%	58.565.669.792	(1.658.914.296)	(2,83%)
522151	Belanja Jasa Profesi	4.477.363.000	4.278.960.750	95,57%	5.098.000.000	(819.039.250)	(18,07%)
522191	Belanja Jasa Lainnya	79.974.459.000	79.522.974.745	99,44%	52.066.175.832	27.456.798.913	52,73%
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	183.391.000	173.183.670	94,43%	2.221.557.621	(2.048.373.951)	(92,20%)
523111	Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan	9.130.314.000	9.124.854.040	99,94%	14.256.245.560	(5.131.931.520)	(35,99%)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.922.869.000	3.901.435.477	99,45%	3.799.141.328	102.294.149	2,69%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	26.919.571.000	26.655.420.225	99,02%	19.932.929.858	6.722.490.367	33,73%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	509.630.000	491.306.980	96,40%	265.575.000	225.731.980	85,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.196.815.000	17.770.874.712	97,66%	19.177.026.478	(1406.151.766)	(7,33%)
524115	Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0,00%	18.430.000	(18.430.000)	(100,00%)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41975.051.000	41570.708.282	99,04%	36.718.890.669	4.851.817.613	13,21%
524211	Belanja Perjalanan Biasa- Luar Negeri	7.670.000.000	7.642.389.790	99,64%	1856.635.243	5.785.754.547	311,63%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya- Luar Negeri	13.671.482.000	13.533.822.920	98,99%	4.576.787.987	8.957.034.933	195,71%
Pengembalian Belanja Barang			(116.336.798)		(2.112.422.919)	1996.086.121	(94,49%)
Jumlah Kelompok Belanja Barang		320.609.879.000	317.822.278.186	99,13%	272.861.812.750	44.960.465.436	16,48%

Kemenko Bidang Perekonomian mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp4.475.422.000,00. Anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp4.430.716.563,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp11.558.331.102,00. Rincian belanja barang penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja barang untuk Penanganan Pandemi Covid 19

Akun	Uraian Akun	Realisasi 31 Desember 2022			Realisasi 31 Desember 2021	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%		Naik (Turun)	%
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	2.996.031.000	2.972.464.088	99,21%	4.480.570.415	(1.508.106.327,00)	(33,66%)
	Biaya Komunikasi, pengadaan masker/hand sanitizer, lisensi aplikasi video conference						
521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	991.000.000	987.423.705	99,64%	3.706.259.266	(2.718.835.561,00)	(73,36%)
	Swab tes antigen dan PCR						
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi Covid 19	305.000.000	297.645.100	97,59%	1.131.513.800	(833.868.700,00)	(73,69%)
	Pengadaan Masker dan Hand Sanitizer sebagai Persediaan						
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	183.391.000	173.183.670	94,43%	2.221.557.621	(2.048.373.951,00)	(92,20%)
	Jasa Penanganan Covid-19 dan Honor Narasumber melalui video conference						
524115	Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	0,00%	18.430.000	(18.430.000,00)	(100,00%)
	Biaya Karantina dalam rangka perjalanan dinas luar negeri						
Jumlah Belanja		4.475.422.000	4.430.716.563	99,00%	11.558.331.102	(7.127.614.539,00)	(61,67%)

B.2.3. BELANJA MODAL

*Realisasi Belanja Modal
Rp7.909.384.162*

Pada periode 31 Desember 2022, pagu Belanja Modal telah terealisasi sebesar 99,84% atau sebesar Rp7.909.384.162,00 dari pagu sebesar Rp7.922.140.000,00. Nominal pagu terbesar pada Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.625.550.000,00, kemudian diikuti Belanja Modal Lainnya sebesar Rp173.590.000,00 yang digunakan untuk perolehan Aset Tak Berwujud dalam bentuk perangkat lunak komputer (*software*) serta diikuti Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp123.000.000,00. Capaian nominal terbesar realisasi Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Peralatan Mesin, yang terealisasi sebesar Rp7.617.368.862,00 atau 99,89%. Sedangkan untuk Belanja Modal Lainnya terealisasi sebesar Rp169.915.300,00 atau 97,88%. Untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan terealisasi sebesar Rp122.100.000,00 atau 99,27%.

Perbandingan realisasi belanja modal pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021, masing-masing sebesar

Rp7.909.384.162,00 dan Rp8.538.871.437,00. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-22 Pagu	Realisasi	%	Realisasi 31 Desember 2021	Perbandingan Realisasi	
						Naik (turun)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.625.550.000	7.617.368.862	99,89%	7.836.055.437	(218.686.575)	(2,79%)
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	123.000.000	122.100.000	99,27%	-	122.100.000	100,00%
5361	Belanja Modal Lainnya	173.590.000	169.915.300	97,88%	702.816.000	(532.900.700)	(75,82%)
Pengembalian Belanja Modal		-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		7.922.140.000	7.909.384.162	99,84%	8.538.871.437	(629.487.275)	(7,37%)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.ASET LANCAR

Aset Lancar
Rp607.154.212

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp607.154.212,00 dan Rp710.395.785,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Aset Lancar	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	44.062.407	50.288.257
3	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	71.841.633	102.210.630
4	Piutang Bukan Pajak	8.358.819	88.570.238
5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(41.795)	(442.851)
6	Persediaan	482.933.148	469.769.511
Jumlah		607.154.212	710.395.785

C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di
Bendahara
Pengeluaran Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 bersaldo sebesar Rp0, adapun saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) per 31 Desember 2022 yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran II.

C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp44.062.407*

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 bersaldo Rp44.062.407,00 dan Rp50.288.257,00. Kas lainnya setara kas per 31 Desember 2022 merupakan kas yang berada di penguasaan bendahara yang bukan berasal dari UP/TUP, antara lain penerimaan uang pengembalian belanja berupa pengembalian perjalanan dinas dan penerimaan uang potongan pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan uang pengembalian belanja lewat tahun atas perjalanan dinas sebesar Rp35.780.800,00;
- Penerimaan uang potongan pajak yang belum disetor sebesar Rp8.281.607,00.

C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

*Belanja Dibayar
Dimuka
Rp71.841.633*

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp71.841.633,00 dan Rp102.210.630,00. Saldo per 31 Desember 2022 merupakan manfaat yang sisa manfaatnya melampaui tanggal pelaporan. Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2022 merupakan belanja atas jasa langganan aplikasi tableau yang sisa manfaatnya masih dapat digunakan melebihi tanggal pelaporan. Detail aplikasi tableau yang dicatat menjadi belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Belanja Dibayar Dimuka

No	Uraian	Nilai Pembelian	Tanggal Pembelian	Tanggal Berakhir	Sisa Manfaat
1	Langganan Aplikasi Tableau	72.039.000	30-12-22	30-12-23	71.841.633

C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK

*Piutang Bukan
Pajak
Rp8.358.819*

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp8.358.819,00 dan Rp88.570.238,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 merupakan piutang atas honorarium PPNPN. Rincian Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada Lampiran VI.

C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK

*Penyisihan
Piutang Tak*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp41.795 dan

Tertagih Piutang Bukan Pajak (Rp41.795) minus Rp442.851. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2022 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

C.1.6. PERSEDIAAN

Persediaan Rp482.933.148

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp482.933.148,00 dan Rp469.769.511,00. Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran dan peralatan dan mesin yang akan dihibahkan ke pemerintah daerah dan pihak swasta. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Persediaan

No	Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21
1	Barang Konsumsi	244.937.396	224.657.448
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	80.720.620	48.981.400
3	Persediaan Lainnya	157.275.132	196.130.663
Jumlah		482.933.148	469.769.511

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 berdasarkan metode FIFO.

C.2.ASET TETAP

Aset Tetap Rp20.226.931.500

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp20.226.931.500,00 dan Rp20.606.701.257,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21
1	Peralatan dan Mesin	90.851.248.452	83.623.800.130
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.214.385.347	2.092.285.347
3	Aset Tetap Lainnya	547.639.287	547.639.287
Total Nilai Perolehan		93.613.273.086	86.263.724.764
Akumulasi Penyusutan		(73.386.341.586)	(65.657.023.507)
Jumlah		20.226.931.500	20.606.701.257

C.2.1. PERALATAN DAN MESIN

*Peralatan dan
Mesin
Rp90.851.248.452*

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp90.851.248.452,00 dan Rp83.623.800.130,00. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin terdiri pembelian sebesar Rp7.617.368.862,00, transfer masuk sebesar Rp2.000.000,00, hibah masuk sebesar Rp384.283.410,00, aset dari belanja pemeliharaan sebesar Rp226.485.620,00, reklas masuk kodefikasi barang sebesar Rp463.961.525,00, aset ekstrakomptabel sebesar minus Rp1.100.000,00 dan usulan jurnal koreksi BPK atas reklas aset dari belanja pemeliharaan sebesar Rp11.821.500,00. Terdapat mutasi kurang berupa reklas keluar kode barang sebesar Rp463.961.525,00 dikarenakan adanya perbaikan atas kesalahan kodefikasi barang dan usulan jurnal koreksi BPK atas reklas aset tetap yang sudah tidak digunakan sebesar Rp1.013.411.070,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin

Uraian Transaksi	Saldo	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		83.623.800.130
Mutasi Tambah		
Pembelian	7.617.368.862	
Transfer Masuk	2.000.000	
Hibah Masuk TVET System Reform	384.283.410	
Aset dari belanja pemeliharaan	226.485.620	
Reklas Masuk Kodefikasi Barang	463.961.525	
Aset Ekstrakomptabel	(1.100.000)	
Usulan Jurnal Koreksi BPK	11.821.500	
Total Mutasi Tambah	8.704.820.917	
Mutasi Kurang		
Reklas Keluar Kodefikasi Barang	463.961.525	
Usulan Jurnal Koreksi BPK	1.013.411.070	
Total Mutasi Kurang	1.477.372.595	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		90.851.248.452
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2022		72.417.547.997
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022		18.433.700.455

Transaksi penambahan dan pengurangan pada Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 21
Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Jumlah Unit	Rupiah Aset
302	Alat Angkutan Darat	13	894.410.000
303	Alat Ukur	1	11.800.000
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	21	327.690.095
306	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1	72.415.000
307	Alat Kedokteran	1	1.320.000
308	Alat Laboratorium	6	26.480.000
309	Alat Khusus Kepolisian	2	88.850.000
310	Alat Komputer	3	54.407.500
Total		48	1.477.372.595

Tabel 22
Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin

Kelompok BMN	Mutasi Peralatan dan Mesin	Kuantitas	Nilai
A. Saldo Transaksi Pembelian dan Transfer Masuk			
301	Alat Bantu	1	4.862.825
302	Alat Angkutan	18	42.570.000
303	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	35.673.900
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	492	4.311.286.057
306	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	99	2.043.982.870
307	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	1.320.000
308	Alat Laboratorium	9	83.756.000
309	Alat Khusus Kepolisian	2	88.850.000
310	Komputer	144	2.079.310.265
319	Peralatan Olahraga	1	13.209.000
Total Saldo Pembelian dan Transfer Masuk		770	8.704.820.917
B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
	Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset		-
C. Transaksi Pengembangan Melalui KDP			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
	Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset		-
Mutasi Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2022		770	8.704.820.917

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp2.214.385.347*

C.2.2. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.214.385.347,00 dan Rp2.092.285.347,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu berupa Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil.

C.2.3. ASET TETAP LAINNYA

*Aset Tetap
lainnya
Rp547.639.287*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp547.639.287,00 dan Rp547.639.287,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa data gambar satelit atas program hibah JUTPI Phase II, wayang, lukisan dan artwork.

C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp73.386.341.586*

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp73.386.341.586,00 dan Rp65.657.023.507,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 23
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	90.851.248.452	72.417.547.997
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.214.385.347	968.793.589
3	Aset Tetap Lainnya	547.639.287	
Jumlah		93.613.273.086	73.386.341.586

C.3.ASET LAINNYA

*Aset Lainnya
Rp2.015.275.250*

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.015.275.250,00 dan Rp2.952.709.950,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

C.3.1. ASET TAK BERWUJUD

*Aset Tak Berwujud
Rp9.282.906.227*

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.282.906.227,00 dan Rp9.028.538.427,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2022

Jenis Transaksi Aset Tak Berwujud	Nilai
Saldo Awal	9.028.538.427
- <i>Software</i>	8.923.350.927
- Lisensi	105.187.500
Mutasi Tambah	
- Pembelian <i>Software</i> Komputer	169.915.300
- Penggunaan Kembali	84.452.500
- Koreksi Antar Beban	
- Pembelian Lisensi	
- Pengembangan Nilai Aset <i>Software</i>	
- Pengembangan Melalui KDP <i>Software</i>	
Mutasi Kurang	
- Reklas ke Aset Tidak Digunakan	
Penghapusan	
- <i>Software</i> Komputer	
- Lisensi	
Saldo ATB Per 31 Desember 2021	9.282.906.227
- <i>Software</i>	9.177.718.727
- Lisensi	105.187.500

C.3.2. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain
Rp9.532.108.295

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.532.108.295,00 dan Rp13.144.604.725,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas aset tetap dan aset tak berwujud yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Mutasi kurang atas saldo aset tetap yang tidak digunakan dikarenakan adanya penjualan lelang aset peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, terdiri atas:

Tabel 25
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.174.304.780	4.702.348.710
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	8.357.803.515	8.442.256.015
Jumlah		9.532.108.295	13.144.604.725

Mutasi atas saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai
Nilai perolehan per 31 Desember 2021	13.144.604.725
Mutasi Tambah (Usulan Jurnal Koreksi BPK)	
Reklas ke Aset Tidak Digunakan (Usulan Jurnal Koreksi BPK)	1.013.411.070
Mutasi Kurang	
Lelang Peralatan dan Mesin	4.541.455.000
Penggunaan Kembali ATB (Usulan Jurnal Koreksi BPK)	84.452.500
Saldo Akhir 31 Desember 2022	9.532.108.295

C.3.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Lain-lain
Rp16.799.739.272*

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp 16.799.739.272,00 dan Rp19.220.433.202,00.

Tabel 27
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	9.177.718.727	7.937.339.352	1.240.379.375
2	Lisensi	105.187.500	78.890.625	26.296.875
Jumlah A. Aset Tak Berwujud		9.282.906.227	8.016.229.977	1.266.676.250
B	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
1	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		-		-
C	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.174.304.780	1.162.628.280	11.676.500
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	8.357.803.515	7.620.881.015	736.922.500
Jumlah B. Aset Lainnya		9.532.108.295	8.783.509.295	748.599.000
D	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			
1	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			-
Aset Lainnya Yang Belum Diregister				
Total		18.815.014.522	16.799.739.272	2.015.275.250

C.4.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp5.497.508.762*

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.497.508.762,00 dan Rp5.153.692.713,00 yang merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek diantaranya terdapat uang UP/TUP utang belanja pegawai yang masih

harus dibayar, utang belanja barang yang masih harus dibayar, tunggakan TA 2022 yang dibayar TA 2023 dan utang jangka pendek lainnya.

C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

*Utang Kepada
Pihak ketiga
Rp5.489.227.155*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.489.227.155,00 dan Rp5.149.007.713,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian detail Utang Pihak Ketiga dapat dilihat pada Lampiran III.

Tabel 28
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian Akun	Saldo	Keterangan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4.578.398.303	Utang Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022 dibayar Januari 2023
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	910.828.852	Tagihan atas listrik, telepon Desember TA 2022 dibayar TA 2023 serta tunggakan TA 2022 yang akan dibayar di TA 2023
Total	5.489.227.155	-

C.4.2. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp8.281.607*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 bersaldo Rp8.281.607,00 dan Rp4.685.000,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2022 merupakan saldo kas yang berasal dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian saldo utang pajak yang belum disetor dapat dilihat pada Lampiran IV.

C.5.EKUITAS

*Ekuitas
Rp17.351.852.200*

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.351.852.200,00 dan Rp19.116.114.279,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp0*

Tabel 29
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik/Turun	Naik/Turun
				%
Pendapatan PNBPN Lainnya				
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-	-
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-	-
- Pendapatan Anggaran Lain Lain	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp108.618.302.334,00 dan Rp105.227.710.960,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah Beban Pegawai mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan adanya penerimaan pegawai baru pada tahun 2022. Selisih saldo belanja pegawai antara LRA dan LO dikarenakan terdapat jurnal balik atas belanja pegawai TA 2021 yang dibayarkan di TA 2022 sebesar Rp4.917.276.663,00 dan jurnal akrual atas belanja pegawai TA 2022 yang dibayarkan di TA 2023 sebesar Rp4.578.398.303,00.

*Beban Pegawai
Rp108.618.302.334
4*

Tabel 30
Rincian Beban Pegawai

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	27.564.118.658	26.035.785.080	1.528.333.578
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	407.188	460.816	(53.628)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.594.082.576	1.525.806.970	68.275.606
511122	Beban Tunj. Anak PNS	411.728.976	394.235.994	17.492.982
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4.175.720.000	4.955.010.000	(779.290.000)
511124	Beban Fungsional PNS	710.994.950	403.425.000	307.569.950
511125	Beban Tunj. PPh PNS	228.818.833	268.805.980	(39.987.147)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	1.368.448.350	1.328.931.240	39.517.110
511129	Beban Uang Makan PNS	4.309.273.000	4.714.374.050	(405.101.050)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	881.840.000	840.600.000	41.240.000
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	306.250.000	262.500.000	43.750.000
512211	Beban Uang Lembur	102.798.000	93.177.000	9.621.000
512411	Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	66.963.821.803	64.454.574.567	2.509.247.236
Pengembalian Beban Pegawai		-	(49.975.737)	49.975.737
Jumlah		108.618.302.334	105.227.710.960	3.390.591.374

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp4.457.875.547

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.457.875.547,00 dan Rp4.732.239.494,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Selisih saldo beban persediaan antara LRA dan LO dikarenakan pada saldo persediaan di LRA merupakan saldo pembelian persediaan selama TA 2022, sedangkan saldo persediaan di LO merupakan saldo atas pemakaian persediaan selama TA 2022. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Persediaan

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik / (Turun)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	3.660.940.960	3.495.995.782	164.945.178
593149	Beban Persediaan Lainnya	795.269.587	1.236.243.712	(440.974.125)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	1.665.000		
Jumlah Beban Persediaan		4.457.875.547	4.732.239.494	(276.028.947)

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa
Rp212.343.338.230

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp212.343.338.230,00 dan Rp323.965.848.155,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas. Perbedaan saldo beban barang dan jasa antara LRA dan LO dikarenakan adanya jurnal balik dan jurnal akrual selama TA 2022. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Barang dan Jasa

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%	Saldo LRA TA 2022	Penjelasan Perbedaan Saldo LO & LRA
521111	Beban Keperluan Perkantoran	6.112.852.985	7.560.359.985	(1.447.507.000)	(19,15%)	6.132.900.704	Terdapat jurnal penyesuaian
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22.974.125	21.892.000	1.082.125	4,94%	22.974.125	-
521115	Beban Honor Operasional Satker	1.508.084.000	1.411.440.500	96.643.500	6,85%	1.508.084.000	-
521119	Beban Barang Operasional lainnya	2.597.546.169	2.587.683.606	9.862.563	0,38%	2.597.546.169	-
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid	2.972.464.088	4.516.217.228	(1.543.753.140)	(34,18%)	2.972.464.088	-
521211	Beban Bahan	9.357.314.046	6.428.591.264	2.928.722.782	45,56%	9.263.271.396	Jurnal penyesuaian atas tunggakan
521213	Beban Honor Output Kegiatan	5.599.210.000	6.014.937.500	(415.727.500)	(6,91%)	5.599.210.000	-
521219	Beban Barang Non Operasional	1.228.040.284	1.242.237.011	(14.196.727)	(1,14%)	1.228.040.284	-
521241	Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi	987.423.705	3.706.259.266	(2.718.835.561)	(73,36%)	987.423.705	-
522111	Beban Langganan Listrik	4.053.763.367	2.374.528.114	1.679.235.253	70,72%	3.975.704.760	Jurnal balik dan jurnal akrual
522112	Beban Langganan Telepon	78.263.252	86.490.872	(8.227.620)	(9,51%)	79.801.345	Jurnal balik dan jurnal akrual
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.969.078.411	6.953.603.602	15.474.809	0,22%	6.938.709.414	Jurnal balik dan jurnal akrual
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	2.505.800	1.705.500	800.300	46,92%	2.505.800	-
522131	Beban Jasa Konsultan	10.231.895.121	8.588.701.250	1.643.193.871	19,13%	10.231.895.121	-
522141	Beban Sewa	56.902.221.848	58.565.029.614	(1.662.807.766)	(2,84%)	56.906.755.496	Jurnal balik dan jurnal akrual
522151	Beban Jasa Profesi	4.293.960.750	5.098.000.000	(804.039.250)	(15,77%)	4.278.960.750	Jurnal penyesuaian atas tunggakan
522191	Beban Jasa Lainnya	99.241.574.959	208.357.961.640	(109.116.386.681)	(52,37%)	79.516.033.889	Terdapat jurnal penyesuaian
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel	6.525.000	56.793.350	(50.268.350)	(88,51%)		Hasil output aplikasi
522192	Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid 19	173.183.670	2.221.557.621	(2.048.373.951)	(92,20%)	173.183.670	-
521252	Beban Peralatan dan Mesin- Ekstrakomtabel	4.456.650	-	4.456.650	100,00%	4.456.650	-
Pengembalian Beban Barang & Jasa		-	(1.828.141.768)	1.828.141.768	(100,00%)	1.828.141.769	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa		212.343.338.230	323.965.848.155	(111.622.509.925)	(34,46%)	194.248.063.135	-

Beban barang dan jasa khusus penanganan pandemi Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.133.071.463,00 yang terdiri dari Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp2.972.464.088,00, Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp987.423.705,00 dan Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp173.183.670,00. Rincian beban barang dan jasa khusus penanganan pandemi Covid-19 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Barang Jasa Penanganan Pandemi

No	Beban	Jumlah	Keterangan
1	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	2.972.464.088	
	Biaya Komunikasi, pengadaan masker/hand sanitizer, lisensi aplikasi video conference		
2	Beban barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	987.423.705	
	Swab tes antigen dan PCR		
3	Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	173.183.670	
	Jasa Penanganan Covid 19 dan honor narasumber melalui video conference		
Jumlah		4.133.071.463	

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

*Beban
Pemeliharaan
Rp13.128.995.299*

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.128.995.299,00 dan Rp17.115.089.880,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Selisih beban pemeliharaan antara LRA dan LO dikarenakan terdapat reklas dari belanja pemeliharaan ke belanja modal sebesar Rp206.783.120,00. Selain itu pada saldo beban pemeliharaan di LRA tidak memperhitungkan saldo beban persediaan bahan untuk pemeliharaan. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.982.178.970	13.191.346.802	(4.209.167.832)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.825.505.927	3.517.316.844	308.189.083
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	321.310.402	406.426.234	(85.115.832)
Jumlah		13.128.995.299	17.115.089.880	(3.986.094.581)

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp107.732.136.167*

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp107.732.136.167,00 dan Rp82.238.673.327,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Selisih saldo belanja perjalanan dinas antara LRA dan LO dikarenakan adanya pengembalian perjalanan dinas yang disetorkan di TA 2023 sebesar Rp35.780.700,00 dan tunggakan belanja perjalanan dinas TA 2022 sebesar Rp181.870.000,00. Rincian beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)
524111	Beban Perjalanan Biasa	26.635.960.799	19.932.669.858	6.703.290.941
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	491.306.980	265.575.000	225.731.980
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.952.539.712	19.177.026.478	(1.224.486.766)
524115	Beban Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	-	18.430.000	(18.430.000)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41.514.338.987	36.695.829.912	4.818.509.075
524211	Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	7.608.903.990	1.856.635.243	5.752.268.747
524219	Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	13.529.085.699	4.576.787.987	8.952.297.712
<i>Pengembalian Beban Perjalanan Dinas</i>		-	(284.281.151)	284.281.151
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		107.732.136.167	82.238.673.327	25.493.462.840

D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

*Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp1.220.362.973*

Jumlah beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.220.362.973,00 dan Rp1.312.758.326,00. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2022 merupakan beban atas penyerahan alat penunjang pendidikan berupa peralatan mesin yang berasal dari Hibah TVET System Reform.

D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp9.730.779.673*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.730.779.673,00 dan Rp10.252.582.040,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.544.717.039	8.841.315.117	(296.598.078)	(3,35%)
Beban Penyusutan Jaringan	55.359.634	52.250.423	3.109.211	5,95%
Beban Amortisasi Software	886.200.250	1.130.562.750	(244.362.500)	(21,61%)
Beban Amortisasi Lisensi	10.518.750	115.168.750	(104.650.000)	(90,87%)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	222.307.500	113.285.000	109.022.500	96,24%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	11.676.500		11.676.500	100,00%
Beban Penyusutan aset tetap lainnya	-		-	100,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.730.779.673	10.252.582.040	(521.802.367)	(5,09%)

D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp401.056)*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar minus Rp401.056,00 dan Rp210.058,00. Saldo atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi atas penyesuaian atas saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagih periode berjalan dengan periode sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang- TP/TGR		-	-	100,00%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(401.056)	210.058	(611.114)	(290,93%)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(401.056)	210.058	(611.114)	(290,93%)

D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Kegiatan Non
Operasional
Rp1.668.149.178*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.668.149.178,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional				
- Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	1.457.074.326	806.569.611	650.504.715	80,65%
# Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.457.074.326	1.030.819.404	426.254.922	41,35%
# Beban Pelepasan Aset Non Lancar		224.249.793	(224.249.793)	(100,00%)
- Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	211.074.852	8.911.951	202.162.901	2268,45%
# Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	226.474.852	8.911.951	217.562.901	2441,25%
a. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	25.989.852	190.051	25.799.801	13575,20%
b. Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	183.235.000	8.721.900	174.513.100	2000,86%
c. Penerimaan Kembali Modal TAYL	1.850.000	-	1.850.000	
d. Pendapat Penyesuaian Nilai Persediaan	15.400.000		15.400.000	-
e. Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi			-	
f. Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR	-		-	-
# Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15.400.000		15.400.000	-
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	1.668.149.178	815.481.562	852.667.616	104,56%

Surplus dari pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya berupa hasil lelang atas barang milik negara yang telah dihentikan dari operasional pemerintahan sebesar Rp1.457.074.326,00. Adapun surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya diperoleh dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu atas Belanja Pegawai sebesar Rp25.989.852,00, Belanja Barang sebesar Rp183.235.000,00, belanja modal sebesar Rp1.850.000,00, pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp15.400.000,00 dan beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp15.400.00,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp19.116.114.279

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp19.116.114.279,00 dan Rp21.360.406.552,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO
Rp(455.563.239.989)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp(455.563.239.989,00) dan (Rp544.029.630.678,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan Akuntansi
Rp0

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada 31 Desember 2022 dan tahun 2021.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS

Koreksi yang
Menambah Ekuitas
(Rp115.924.476)

Saldo Koreksi yang menambah ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah bersaldo minus Rp115.924.476,00. Adapun pada 31 Desember 2021 bersaldo Rp0. Saldo Koreksi yang menguraangi ekuitas tahun 2022 merupakan saldo atas transaksi normalisasi barang milik negara dan koreksi pencatatan barang milik negara.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar
Entitas
Rp453.914.902.386

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp453.914.902.386,00 dan Rp541.852.008.100,00. Transfer Keluar merupakan transfer aset berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp1.067.340.761,00 ke 4 entitas penerima. Terdapat pengesahan hibah langsung sebesar Rp22.094.322.778,00. Rincian Transaksi antar Entitas s.d. 31 Desember 2022 terdiri dari:

Tabel 39
Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Jenis Beban	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.802.322.673)
Ditagikan ke Entitas Lain	434.688.843.042
Transfer Keluar	(1.067.340.761)
Transfer Masuk	1.400.000
Pengesahan Hibah Langsung	22.094.322.778
Jumlah	453.914.902.386

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

*Diterima dari
Entitas Lain
(Rp1.802.322.673)*

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan Bendahara Umum Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp1.802.322.673,00), sedangkan DKEL sebesar Rp434.688.843.042,00. Rincian DDEL dan DKEL per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Jenis Beban	Nilai
Satker 427752	(1.799.973.673)
Satker 427755	(2.349.000)
Jumlah	(1.802.322.673)

*Ditagikan ke
Entitas Lain
Rp434.688.843.042*

Tabel 41
Rincian Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Jenis Beban	Nilai
Satker 427752	415.379.743.036
Satker 427755	19.309.100.006
Jumlah	434.688.843.042

E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

*Transfer Keluar
Rp1.067.340.761*

Transfer masuk/transfer keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari suatu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Terdapat transfer masuk berupa Peralatan dan Mesin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berupa parkir sepeda sebesar Rp2.000.000,00 berdasarkan melalui berita acara serah terima nomor BAST-3/SES.M.EKON/08/2022 pada 25 Juni 2022. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.067.340.761,00). Transfer keluar berupa Peralatan dan Mesin yang telah dilakukan serah terima oleh Kemenko Perekonomian kepada beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Transfer Keluar

Satker	Nilai
Politeknik Negeri Media Kreatif	267.644.854
Politeknik Negeri Batam	265.250.863
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	272.061.771
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya	262.383.273
Jumlah	1.067.340.761

E.5.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

*Pengesahan Hibah
Langsung
Rp22.094.322.778*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp22.094.322.778,00 sedangkan untuk Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(0,00). Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Pengesahan Hibah

Satker	Nilai
Satker 427752	22.094.322.778
Satker 427755	-
Jumlah	22.094.322.778

E.6. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp17.351.852.200*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.351.852.200,00 dan Rp19.116.114.279,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN, yaitu:

- Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola rekening Induk pada Bank Mandiri Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 1030007727577, yang bersaldo sebesar Rp0 per tanggal 31 Desember 2022.
- Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) mengelola rekening Induk pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 651164277551000 yang bersaldo sebesar Rp0 per tanggal 31 Desember 2022.

F.2. REALISASI PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I.

Pagu Anggaran PN I Adalah Rp18.712.882.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp17.891.976.681,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN I antara lain sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran Target Volume Keluaran	Target Volume Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Persentase Realisasi Volume Keluaran
Program Koordinasi Pelaksanaan kebijakan	2519. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	774.052.000	773.903.611	99,98%	1,00	1,00	100%
		PBK.002. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	543.430.000	543.328.851	99,98%	1,00	1,00	100%
		PBK.003. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	664.759.000	664.697.378	99,99%	1,00	1,00	100%
	2521. Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan	PBB.001. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	502.155.000	501.993.397	99,97%	1,00	1,00	100%
		PBB.002. Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	502.233.000	502.177.868	99,99%	1,00	1,00	100%
	4545. Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	970.486.000	969.959.492	99,95%	1,00	1,00	100%
	4550. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	14.755.767.000	13.935.916.084	94,44%	2,00	2,00	100%
Total			18.712.882.000	17.891.976.681	95,61%			

F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.3.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA

Terhadap barang inventaris yang tidak dapat digunakan kembali, telah disampaikan usulan permohonan lelang BMN kendaraan bermotor kepada Kepala KPKNL Jakarta I. Pendapatan atas lelang tersebut kemudian dituangkan dalam salinan risalah lelang Nomor nomor 158/25/2022 tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp1.457.074.326,00.

F.3.2. TRANSFER KELUAR

Terdapat transfer keluar berupa Peralatan dan Mesin yang telah dilakukan serah terima oleh Kemenko Perekonomian sebesar Rp1.067.340.761,00, terdiri dari Politeknik Negeri Media Kreatif sebesar Rp267.644.854,00, Politeknik Negeri Batam sebesar Rp265.250.863,00, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebesar Rp272.061.771,00, dan Balai besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya sebesar Rp262.383.273,00.

F.3.3. TRANSFER MASUK

Terdapat transfer masuk berupa Peralatan dan Mesin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berupa parkir sepeda sebesar Rp2.000.000,00 yang telah dilakukan serah terima melalui berita acara serah terima nomor BAST-3/SES.M.EKON/08/2022 pada 25 Juni 2022.

F.3.4. INFORMASI TUNGGAKAN PEMBAYARAN TA 2022

Terdapat 11 (sebelas) tunggakan pembayaran pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp607.110.936,00, dikarenakan terlanjur dilakukan penyetoran dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang seharusnya dibayarkan kepada penerima (pihak ketiga) yang telah menyelesaikan kegiatan/pekerjaannya. Rincian atas tunggakan tahun anggaran 2022 tersebut antara lain:

No	Kegiatan	Nilai	Keterangan
1	Uang saku rapat konsinyering rapat persiapan dan pelaksanaan outlook (20 s.d. 21 Desember 2022)	Rp53.070.000,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
2	Uang saku rapat konsinyering strategi komunikasi menjaga resiliensi ekonomi (22 s.d. 24 Desember 2022)	Rp41.920.000,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
3	Uang saku rapat konsinyering kegiatan workshop (28 s.d. 30 Desember 2022)	Rp33.360.000,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
4	Uang saku rapat konsinyering pembahasan Perpres Reforma Agraria (27 s.d. 28 Desember 2022)	Rp13.500.000,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
5	Uang saku rapat pembahasan tindak lanjut putusan MK terkait UUCK (29 s.d. 31 Desember 2022)	Rp40.020.000,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

6	Honor Narasumber rapat pembahasan tindak lanjut putusan MK terkait UUCK (29 s.d. 31 Desember 2022)	Rp15.000.000,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
7	Pengadaan seminar kit rapat koordinasi rancangan penetapan PITTI (12.20/RKT/KWT/12/2022)	Rp9.000.000,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
8	Pengadaan cetak buku Perpu No. 2 TA 2022 tentang Cipta Kerja (SPK Nomor: SPK-85/PPK.4550/CB/12/2022)	Rp85.042.650,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
9	Pengadaan jasa penayangan media cetak nasional The Jakarta Post (SPK Nomor: SPK-78/PPK.KEG.4550/MC/12/2022)	Rp137.022.840,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
10	Pengadaan jasa penayangan media nasional Rakyat Merdeka (SPK Nomor: SPK-87/PPK.KEG.4550/MC/12/2022)	Rp93.461.446,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
11	Pengadaan jasa penayangan media cetak nasional di Harian Bisnis Indonesia (SPK Nomor: SPK-86/PPK.KEG.4550/MC/12/2022)	Rp85.714.000,00	Telah dicatat sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
Total		Rp 607.110.936	

F.3.5. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA.035) yaitu pada:

- Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427752/2022 sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan tanggal revisi terakhir 18 Januari 2023 dengan besaran pagu sebesar Rp419.373.595.000,00.
- Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan 9 (sembilan) kali revisi DIPA, dengan tanggal revisi terakhir tanggal 27 Desember 2022 dan besaran pagu sebesar Rp19.458.521.000,00.

F.3.6. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI

Informasi mengenai Hibah Langsung tahun 2022 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

a. HIBAH PROSPERA

Hibah tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam Subsidiary Arrangement (SA) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tanggal 4 Desember 2017, dengan masa perjanjian oleh kedua belah pihak untuk periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2023. Hibah dari pemerintah Australia tersebut teregister di Kementerian Keuangan dengan nomor 23TSV7CA dengan total alokasi nilai hibah sebesar AUD 145.000.000 (Pagu Indikatif) yang dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) Kementerian/Lembaga. Kegiatan hibah yang dibiayai dari pemerintah Australia

dilaksanakan melalui proyek Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA).

Pagu indikatif PROSPERA yang dibiayai dari hibah pemerintah Australia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebesar AUD 53.594.600. Realisasi kegiatan hibah untuk tahun 2019 sebesar Rp76.836.389.526,00, untuk kegiatan Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp141.911.292.772,00, dan untuk kegiatan Tahun 2021 telah dilakukan serah terima hibah dengan nomor BA-7/SET.M.EKON.4/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp128.058.431.254,00. Untuk realisasi kegiatan tahun 2022 akan dilakukan serah terima di tahun 2023.

b. HIBAH TVET SYSTEM REFORM

Hibah TVET System Reform dituangkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman tanggal 15 Mei 2019 dengan periode sampai dengan 31 Mei 2022. Kegiatan hibah tersebut dibiayai oleh Pemerintah Jerman melalui Proyek Kerja Sama Teknis Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Kerujuran. Hibah tersebut telah dilakukan registrasi ke Kementerian Keuangan dengan nomor 2BPKDM1A dengan total nilai alokasi hibah sebesar EUR 3.000.000. Realisasi kegiatan hibah untuk tahun 2022 sebesar Rp20.745.889.282,00 dan telah dilakukan serah terima dengan nomor 01/BAST/TSR/02/2022 tanggal 23 Februari 2022.

c. Hibah KIAT

Hibah Fasilitas Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT) telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan nomor 2FR4C6KA dengan pagu sebesar AUD 150.000.000. Dalam hibah tersebut, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Bappenas menjadi *Executing Agency* dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi salah satu dari *Implementing Agency*. Sebagai *Implementing Agency*, Realisasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021 adalah sebesar Rp634.529.412,00, dan untuk kegiatan tahun 2022 telah dilakukan serah terima dengan nomor BA-59/SET.M.EKON.4/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp1.348.433.496,00.

d. Hibah Jutpi Phase 3

Hibah Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) Phase 3 telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2YT3M6QA dengan pagu sebesar JPY 418.206.000. Hibah tersebut dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Jepang dan Indonesia dengan periode 26 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2025.

F.3.7. INFORMASI TUNTUTAN HUKUM

Terdapat informasi tuntutan hukum atas perkara nomor 451/PK/PDT/2019 dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999. Terkait dengan progress penyelesaian perkara tersebut, saat ini masih dalam proses perhitungan alokasi ganti rugi oleh Tim Panel yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan belum ada perkembangan lanjutan mengenai informasi posisi terakhir atas tindak lanjut putusan pengadilan dimaksud antara lain terkait dengan informasi posisi terakhir atas tindak lanjut putusan pengadilan dimaksud termasuk atas penganggaran dan nilai tertanggungnya.

LAMPIRAN PENDUKUNG

**MONITORING TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2021**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kemenko Perkonomian Belum Memadai	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk: - Melakukan inventarisasi BMN Aset Tetap secara berkala termasuk dalam memperbaharui kode ruangan atas BMN Aset Tetap ketika terjadi pemindahan BMN Aset Tetap; - Menginstruksikan UAKPB untuk melengkapi label kodefikasi seketika BMN telah dicatat pada aplikasi SIMAK-BMN dan membuat perencanaan atas pengadaan label kodefikasi lebih terorganisir agar tidak terjadi kehabisan label Ketika BMN akan ditandai label kodefikasi; dan - Menginstruksikan Kepala Rumah Tangga untuk menetapkan status dari BMN yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: ▪ Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat nomor KU.5.1-846/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: - Melakukan inventarisasi BMN Aset Tetap secara berkala termasuk dalam memperbaharui kode ruangan atas BMN Aset Tetap ketika terjadi pemindahan BMN Aset Tetap; - Melengkapi label kodefikasi seketika BMN telah dicatat pada aplikasi SIMAK-BMN dan membuat perencanaan atas pengadaan label kodefikasi lebih terorganisir agar tidak terjadi kehabisan label Ketika BMN akan ditandai label kodefikasi. ▪ Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang mengintruksikan kepada Kepala Rumah Tangga melalui surat Nomor KU.5.1-499/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2	2023	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			September 2022 untuk menetapkan status dari BMN yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.		
2.	Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Perorangan sebesar Rp3.002.363.636,00 Belum Sesuai dengan Ketentuan	Sesmenko agar: - Menegur KPA agar lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin; - Menegur PPK terkait agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan; dan - Menyusun peraturan terkait besaran standar remunerasi/penghasilan untuk belanja jasa konsultansi perorangan.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: ▪ Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-848/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: - lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin; - melakukan pembinaan kepada PPK terkait agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan. ▪ Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang mengintruksikan kepada PPK KPPIP dan PPK Biro KLIP melalui surat Nomor KU.5.1-500/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 untuk: a) lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin dan b) agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka	2023	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan. Sesmenko Bidang Perekonomian juga mengintruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan melalui surat nomor KU.5.1-847/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 untuk menyusun peraturan terkait besaran standar remunerasi/penghasilan untuk belanja jasa konsultasi perorangan.		
3.	Belanja Sewa Peralatan Kantor yang Tidak Efisien sebesar Rp610.087.200,00 di Antaranya Terdapat Kelebihan Bayar sebesar Rp2.160.000,00	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: - Menginstruksikan PPK Deputy 4 menagih kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 serta lebih cermat dalam menyusun HPS belanja sewa peralatan kantor; dan - Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran belanja barang dan belanja modal di satuan kerjanya.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: - Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-849/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: - Menginstruksikan PPK Deputy 4 menagih kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 serta lebih cermat dalam menyusun HPS belanja sewa peralatan kantor; dan - Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran belanja barang dan belanja modal di satuan kerjanya.	2023	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			- Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang mengintruksikan kepada PPK D.IV melalui surat Nomor KU.5.1-501/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 untuk menagih kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 serta lebih cermat dalam menyusun HPS belanja sewa peralatan kantor. - Penyedia jasa kemudian melakukan penyetoran kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 pada tanggal 19 Mei 2022 dengan bukti setor NTPN Nomor: 7C24B2G4V712GBOQ.		
4.	Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Lainnya Kegiatan <i>Media Placement</i> pada Biro Perencanaan sebesar Rp33.810.000,00	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk: - Menginstruksikan PPK untuk menagih kelebihan pembayaran atas belanja jasa lainnya kegiatan <i>media placement</i> sebesar Rp33.810.000,00 serta cermat dalam melakukan penelitian dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penagihan; dan - Menyusun pedoman berdasarkan ketentuan yang berlaku atas kegiatan publikasi khususnya <i>media placement</i>.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-850/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menginstruksikan PPK Biro Perencanaan untuk menagih kepada penyedia jasa atas kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya kegiatan <i>media placement</i> sebesar Rp33.810.000,00 serta agar lebih cermat dalam melakukan	2023	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			penelitian dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penagihan; ▪ Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan (KLIP) melalui surat Nomor KU.5.1-851/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menyusun pedoman berdasarkan ketentuan yang berlaku atas kegiatan publikasi khususnya media placement; ▪ Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang mengintruksikan kepada PPK Biro Perencanaan melalui surat Nomor KU.5.1-502/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menginstruksikan kepada penyedia jasa terkait atas kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya kegiatan media placement sebesar Rp33.810.000,00, serta agar lebih cermat dalam melakukan penelitian dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penagihan. ▪ Penyedia jasa kemudian melakukan penyetoran kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya kegiatan media placement sebesar Rp33.810.000,00 pada tanggal 20 September 2022 dengan bukti setor NTPN Nomor: ABB962G4V7414ROO.		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
5.	Terdapat Lebih Bayar atas Realisasi Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp25.690.000,00 atas pengadaan jasa <i>Professional Conference Organizer (PCO)</i> Presidensi G20 Indonesia	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: - Menginstruksikan PPK Deputy 7 untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas Belanja Jasa Lainnya dan menagih kelebihan pembayaran atas jasa tenaga medis antigen kru dan <i>driver</i> sebesar Rp25.690.000,00; dan - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di satuan kerjanya.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: - Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-852/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: - Menginstruksikan PPK Deputy 7 untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap Belanja Jasa Lainnya dan menagih penyedia jasa atas kelebihan pembayaran atas jasa tenaga medis antigen kru dan <i>driver</i> sebesar Rp25.690.000,00; dan - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. - Berdasarkan hal tersebut, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran menginstruksikan kepada PPK Deputy 7 melalui surat nomor KU.5.1/503/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 02 September 2022 agar: - Lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap Belanja Jasa Lainnya dan menagih kepada penyedia jasa terkait atas kelebihan pembayaran	2023	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			atas jasa tenaga medis antigen kru dan driver sebesar Rp25.690.000,00; dan b. Lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran. ▪ Penyedia jasa kemudian melakukan penyetoran kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya sebesar Rp25.690.000,00 pada tanggal 06 September 2022 dengan bukti setor NTPN Nomor: F32027QLU6FOLDD8.		
6.	Terdapat indikasi Pemecahan Kontrak atas beberapa paket Belanja Modal pada Biro Umum sebesar Rp4.179.105.810,00	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: a. Menegur PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerjanya. c. Menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: ▪ Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-853/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan c. Menginstruksikan PPK Biro Umum untuk menyampaikan penjelasan dan bukti	2023	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			pendukung pertanggungjawaban kepada pihak Inspektorat atas selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00. - Berdasarkan hal tersebut, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran menginstruksikan kepada PPK Biro Umum melalui surat nomor KU.5.1/504/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 02 September 2022 agar: a. Lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran; b. Lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan c. Menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung pertanggungjawaban kepada pihak Inspektorat atas selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00.		
7.	Terdapat Pemecahan Paket, Kesalahan Anggaran dan Realisasi, Serta Kekurangan Volume Sebesar	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: a. Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat	2023	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Rp75.599.000,00 atas Enam Paket Pekerjaan Canopy	b. Menginstruksikan PPK Sekretariat I agar lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa	Nomor KU.5.1-854/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: a. Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan b. Menginstruksikan PPK Sekretariat I agar lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Berdasarkan hal tersebut, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran menginstruksikan kepada PPK Biro Umum melalui surat nomor KU.5.1/505/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 02 September 2022 agar: a. Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan b. Lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa.		

**MONITORING TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tanggapan dan Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Ket
1.	Belanja Jasa Konsultansi Pelaksanaan Diagnosis Kesiapan Pendistribusian Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Sehat Tahun 2020 Belum Sesuai dengan Ketentuan	Sesmenko agar: 1. Memberikan teguran secara tertulis kepada PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak; dan 2. Melakukan pengaturan di Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terkait pengendalian pertanggungjawaban kegiatan dalam pengadaan jasa konsultansi.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah: ▪ Menko Perekonomian atas nama Sesmenko Perekonomian telah mengintruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 5032 melalui surat Nomor KU.5.1-153/M.EKON/06/2021 tgl 16 September 2021, untuk: 1. lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak; dan 2. Melakukan pengaturan di Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terkait pengendalian pertanggungjawaban kegiatan dalam pengadaan jasa konsultansi, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada periode berikutnya. • Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban kegiatan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, bahwasanya dilakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis sebagai berikut: a. Pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 23 September 2021, yang ditujukan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK dan Seluruh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) melalui surat Nomor	2023	Belum sesuai

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tanggapan dan Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Ket
			BM.1/203/SET.M.EKON.4/09/2021 Tanggal 20 September 2021; b. Pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 24 September 2021, yang ditujukan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK dan Seluruh Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Pokja melalui surat Nomor BM.1/204/SET.M.EKON.4/09/2021 Tanggal 20 September 2021.		

**Lampiran II. Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2022**

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Ket
						Nomor	Tanggal			
1	427752	103-00-0772757-7	RKK KEMENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	20	S-1044/WPB.12/KP.02/2020	02-06-2020	31-12-2022	Rp0	-
2	427752	8100-1242-7752-1000	BPG 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	20	S-1044/WPB.12/KP.02/2020	02-06-2020	31-12-2022	Rp0	-
3	427752	8100-1242-7752-1001	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
4	427752	8100-1242-7752-1002	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
5	427752	8100-1242-7752-1003	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
6	427752	8100-1242-7752-1004	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

7	427752	8100-1242-7752-1005	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
8	427752	8100-1242-7752-1006	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
9	427752	8100-1242-7752-1007	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
10	427752	8100-1242-7752-1008	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
11	427752	8100-1242-7752-1009	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
12	427752	8100-1242-7752-1010	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
13	427752	8100-1242-7752-1011	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

14	427752	8100-1242-7752-1012	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
15	427752	8100-1242-7752-1013	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29-01-2021	31-12-2022	Rp0	-
16	427752	8100-1242-7752-1014	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-690/KPN.1202/2022	18-05-2022	31-12-2022	Rp0	
17	427752	8100-1242-7752-1015	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-690/KPN.1202/2022	18-05-2022	31-12-2022	Rp0	
18	427755	0329-01-004393-30-0	RKK KEMENKO PEREKONOMIAN	Bank Rakyat Indonesia KCP Departemen Keuangan	20	S-1045/WPB.12/KP.02/2020	02-06-2020	31-12-2022	Rp0	-

Lampiran III Rincian Pengembalian Belanja Pegawai

Nama	Keterangan Pengembalian	Jumlah
FM	Gaji Bulan Oktober	Rp3.321.900
RM	Tukin Bulan Mei	Rp5.004.343
HB	Tunjangan Kinerja Bulan Januari s.d. September 2022	Rp48.414.900
RMH	Tunjangan Jabatan Bulan November dan Desember 2022	Rp1.080.000
TA	Tunjangan Fungsional Bulan September 2022	Rp700.000
CPN	Tunjangan Fungsional Bulan September 2022	Rp700.000
LG	Tunjangan Umum bulan Juli s.d. September 2022	Rp555.000
RK	Tunjangan Umum Bulan November 2022	Rp185.000
SH	Gaji Bulan Oktober dan November 2022	Rp7.736.600
RW	Gaji Bulan Agustus 2022	Rp2.740.100
RU	Gaji Bulan Juli 2022	Rp4.036.800
ABS	Tunjangan Kinerja Bulan Agustus 2022	Rp5.847.636
AP	Gaji Induk Mei	Rp3.064.900
IF	Tunjangan Kinerja Bulan Mei	Rp11.017.143
EM	Tunjangan Jabatan Juli	Rp540.000
Total Setoran Pengembalian		Rp94.944.322
Pengembalian Tunj. Fungsional	Potongan SPM	Rp370.050
Pengembalian Gaji Pokok	Potongan SPM	Rp941
Pembulatan Gaji PNS	Potongan SPM	Rp15.460
Total Pengembalian Belanja Gaji Pegawai		Rp95.330.773

Lampiran IV. Daftar Rincian Utang Pihak Ketiga

Kode Akun	No.	Uraian	Nominal per 31 Des 2021
212111		Belanja Pegawai Masih Harus Dibayar	
	1	Pembayaran Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Januari Tahun 2023 untuk 329 Pegawai	Rp2.380.521.505
	2	Pembayaran Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Januari Tahun 2023 untuk 5 Pegawai Staf Khusus PPNPN	Rp137.887.500
	3	Pembayaran Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Januari Tahun 2023 untuk 124 pegawai	Rp1.089.626.630
	4	Pembayaran Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Januari Tahun 2023 untuk 186 pegawai	Rp802.948.328
	5	Pembayaran Belanja Pegawai Tunjangan 1 pegawai	Rp49.860.000
	6	Tunjangan Kinerja TA 2021 KEK	Rp117.554.340
		Subtotal	Rp4.578.398.303
212112		Belanja Barang Masih Harus Dibayar	
	7	Tagihan Telepon Desember (427752)	Rp4.277.806
	8	Tagihan Listrik Desember (427752)	Rp295.905.571
	9	Tunggakan TA 2022	Rp607.110.936
	10	Tagihan Telepon Desember (427755)	Rp201.750
	11	Tagihan Listrik (427755)	Rp3.332.789
		Subtotal	Rp910.828.852
		Total	Rp5.489.227.155

Lampiran V Daftar Saldo Utang Pajak Belum Disetor

No	Akun Pajak	Jenis Pajak	Nilai
1	411211	PPN Dalam Negeri	3.284.957
2	411122	PPh Pasal 22	1.313.871
3	411124	PPh Pasal 23	3.682.779
Total			8.281.607

Lampiran VI Piutang Bukan Pajak

Keterangan	Nominal
Piutang PPNPN Satker Menko 427752	4.175.319
Piutang PPNPN Satker KEK 427755	4.183.500
Total	8.358.819
Penyisihan Piutang (0,5%)	41.795

Lampiran VII Laporan Pendukung

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 035

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/23 11:48 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_kl_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	1,802,322,673	1,802,322,673	0	0	1,162,464,429	(1,162,464,429)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	1,802,322,673	1,802,322,673	0	0	1,162,464,429	(1,162,464,429)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	110,280,097,000	108,957,180,694	1,322,916,306	99	106,114,146,000	105,392,362,716	721,783,284	99
	BELANJA BARANG	320,629,879,000	317,822,278,186	2,807,600,814	99	280,335,133,000	272,861,812,750	7,473,320,250	97
	BELANJA MODAL	7,922,140,000	7,909,384,162	12,755,838	100	9,247,045,000	8,538,871,437	708,173,563	92
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 035

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 11:48 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	438,832,116,000	434,688,843,042	4,143,272,958	99	395,696,324,000	386,793,046,903	8,903,277,097	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 11:47 AM

Halaman : 1

lap_lo_kl

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	108,618,302,334	105,227,710,960	3,390,591,374	3.222
Beban Persediaan	4,457,875,547	4,732,239,494	(274,363,947)	(5.798)
Beban Barang dan Jasa	212,343,338,230	323,965,848,155	(111,622,509,925)	(34.455)
Beban Pemeliharaan	13,128,995,299	17,115,089,880	(3,986,094,581)	(23.29)
Beban Perjalanan Dinas	107,732,136,167	82,238,673,327	25,493,462,840	30.999
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1,220,362,973	1,312,758,326	(92,395,353)	(7.038)
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 11:47 AM

Halaman : 2

lap_lo_kl

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,730,779,673	10,252,582,040	(521,802,367)	(5.089)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(401,056)	210,058	(611,114)	(290.92 6)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	457,231,389,167	544,845,112,240	(87,613,723,073)	(16.08)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(457,231,389,167)	(544,845,112,240)	87,613,723,073	(16.08)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1,457,074,326	806,569,611	650,504,715	80.651
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,457,074,326	1,030,819,404	426,254,922	41.351
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	224,249,793	(224,249,793)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	211,074,852	8,911,951	202,162,901	2,268.4 47
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	226,474,852	8,911,951	217,562,901	2,441.2 49
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15,400,000	0	15,400,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,668,149,178	815,481,562	852,667,616	104.56
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(455,563,239,989)	(544,029,630,678)	88,466,390,689	(16.261)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(455,563,239,989)	(544,029,630,678)	88,466,390,689	(16.261)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 11:48 AM

Halaman : 1

lap_lpe_kl

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	19,116,114,279	21,360,406,552	(2,244,292,273)	(10.507)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(455,563,239,989)	(544,029,630,678)	88,466,390,689	(16.261)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(115,924,476)	(66,669,695)	(49,254,781)	73.879
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(115,924,476)	(142,268,695)	26,344,219	(18.517)
LAIN-LAIN	0	75,599,000	(75,599,000)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	453,914,902,386	541,852,008,100	(87,937,105,714)	(16.229)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,764,262,079)	(2,244,292,273)	480,030,194	(21.389)
EKUITAS AKHIR	17,351,852,200	19,116,114,279	(1,764,262,079)	(9.229)

Keterangan :

FINAL

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data 05/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak 05/05/23 10:44 AM

Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	44,062,407	50,288,257	(6,225,850)	(12.38)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	71,841,633	102,210,630	(30,368,997)	(29.71)
Piutang Bukan Pajak	8,358,819	88,570,238	(80,211,419)	(90.56)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(41,795)	(442,851)	401,056	(90.56)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	8,317,024	88,127,387	(79,810,363)	(90.56)
Persediaan	482,933,148	469,769,511	13,163,637	2.80
JUMLAH ASET LANCAR	607,154,212	710,395,785	(103,241,573)	(14.53)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	90,851,248,452	83,623,800,130	7,227,448,322	8.64
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,214,385,347	2,092,285,347	122,100,000	5.84
Aset Tetap Lainnya	547,639,287	547,639,287	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(73,386,341,586)	(65,657,023,507)	(7,729,318,079)	11.77
JUMLAH ASET TETAP	20,226,931,500	20,606,701,257	(379,769,757)	(1.84)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	9,282,906,227	9,028,538,427	254,367,800	2.82
Aset Lain-lain	9,532,108,295	13,144,604,725	(3,612,496,430)	(27.48)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(16,799,739,272)	(19,220,433,202)	2,420,693,930	(12.59)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,015,275,250	2,952,709,950	(937,434,700)	(31.75)
JUMLAH ASET	22,849,360,962	24,269,806,992	(1,420,446,030)	(5.85)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,489,227,155	5,149,007,713	340,219,442	6.61
Utang Jangka Pendek Lainnya	8,281,607	4,685,000	3,596,607	76.77
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,497,508,762	5,153,692,713	343,816,049	6.67
JUMLAH KEWAJIBAN	5,497,508,762	5,153,692,713	343,816,049	6.67
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	17,351,852,200	19,116,114,279	(1,764,262,079)	(9.23)
JUMLAH EKUITAS	17,351,852,200	19,116,114,279	(1,764,262,079)	(9.23)
JUMLAH EKUITAS	17,351,852,200	19,116,114,279	(1,764,262,079)	(9.23)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,849,360,962	24,269,806,992	(1,420,446,030)	(5.85)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data 05/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak 05/05/23 10:44 AM

Halaman 2

lap_neraca_kl_komparatif

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 05/05/23 10:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	44,062,407	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	71,841,633	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	8,358,819	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	41,795
0.0	117111	Barang Konsumsi	244,937,396	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	80,720,620	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	157,275,132	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	90,851,248,452	0
0.0	134113	Jaringan	2,214,385,347	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	547,639,287	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	72,417,547,997
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	968,793,589
0.0	162151	Software	9,177,718,727	0
0.0	162161	Lisensi	105,187,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,174,304,780	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	8,357,803,515	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	1,162,628,280
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	7,937,339,352
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	78,890,625
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	7,620,881,015
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	4,578,398,303
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	910,828,852
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	8,281,607
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	434,688,843,042
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,802,322,673	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,067,340,761	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,400,000
0.0	391111	Ekuitas	0	19,116,114,279
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	115,924,476	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	22,094,322,778
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,457,074,326
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	25,989,852
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	183,235,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	1,850,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	15,400,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	27,564,118,658	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	407,188	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,594,082,576	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 05/05/23 10:44 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	411,728,976	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,175,720,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	710,994,950	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	228,818,833	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,368,448,350	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,309,273,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	881,840,000	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	306,250,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	102,798,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	66,963,821,803	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,112,852,985	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,974,125	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,508,084,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,597,546,169	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	2,972,464,088	0
3.0	521211	Beban Bahan	9,357,314,046	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	5,599,210,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,228,040,284	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	987,423,705	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,456,650	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	4,053,763,367	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	78,263,252	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,969,078,411	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	2,505,800	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	10,231,895,121	0
3.0	522141	Beban Sewa	56,902,221,848	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,293,960,750	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	99,241,574,959	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	173,183,670	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,982,178,970	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,825,505,927	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	26,635,960,799	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	491,306,980	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17,952,539,712	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41,514,338,987	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	7,608,903,990	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	13,529,085,699	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8,544,717,039	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 05/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 05/05/23 10:44 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	55,359,634	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	886,200,250	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	10,518,750	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	222,307,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	11,676,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,660,940,960	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	321,310,402	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	1,018,762,973	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	201,600,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	1,665,000	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	795,269,587	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	15,400,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	401,056
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	6,525,000	0
JUMLAH			573,268,261,748	573,268,261,748

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 11:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	434,688,843,042
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,802,322,673	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,457,074,326
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	25,989,852
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	317,408,495
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	1,850,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	27,614,745,199	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	20,901,241
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	369,809	385,269
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	422,648	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,594,082,576	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	411,728,976	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	540,000
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,176,260,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	713,845,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	2,850,050
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	228,818,833	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,368,448,350	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,309,273,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	882,580,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	306,250,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	102,798,000	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	70,284,022
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	67,343,258,885	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,132,900,704	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,974,125	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,508,084,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,597,546,169	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	2,972,464,088	0
3.0	521211	Belanja Bahan	9,263,271,396	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	30,920,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,630,130,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,228,040,284	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	987,423,705	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,456,650	0
3.0	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	7,326,000	7,326,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,027,692,797	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 11:48 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	464,682,439	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	297,645,100	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,975,704,760	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	79,801,345	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,938,709,414	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,505,800	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	10,231,895,121	0
3.0	522141	Belanja Sewa	56,906,755,496	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,278,960,750	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	6,940,856
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	79,522,974,745	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	173,183,670	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,124,854,040	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,901,435,477	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	26,655,420,225	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	19,459,426
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	491,306,980	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17,770,874,712	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	130,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41,570,708,282	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	54,149,295
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	7,642,389,790	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	4,737,221
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	13,533,822,920	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,595,057,862	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	144,411,000	122,100,000
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	122,100,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	169,915,300	0
JUMLAH			436,832,629,095	436,832,629,095

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/23 11:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	25,749,580,000	27,747,705,000	27,614,745,199	20,901,241	27,593,843,958	99.52	153,861,042
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	733,000	783,000	422,648	15,460	407,188	53.98	375,812
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,615,420,000	1,622,920,000	1,594,082,576	0	1,594,082,576	98.22	28,837,424
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	416,365,000	419,365,000	411,728,976	0	411,728,976	98.18	7,636,024
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5,073,880,000	4,236,580,000	4,176,260,000	540,000	4,175,720,000	98.58	60,860,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	450,000,000	771,500,000	713,845,000	2,850,050	710,994,950	92.53	60,505,050
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	242,000,000	242,000,000	228,818,833	0	228,818,833	94.55	13,181,167
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,359,613,000	1,394,113,000	1,368,448,350	0	1,368,448,350	98.16	25,664,650
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,585,660,000	4,608,784,000	4,309,273,000	0	4,309,273,000	93.5	299,511,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	838,390,000	901,390,000	882,580,000	740,000	881,840,000	97.91	19,550,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	41,331,641,000	41,945,140,000	41,300,204,582	25,046,751	41,275,157,831	98.46	669,982,169
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	210,000,000	307,250,000	306,250,000	0	306,250,000	99.67	1,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	210,000,000	307,250,000	306,250,000	0	306,250,000	99.67	1,000,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	182,580,000	132,580,000	102,798,000	0	102,798,000	77.54	29,782,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	182,580,000	132,580,000	102,798,000	0	102,798,000	77.54	29,782,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	78,996,091,000	67,895,127,000	67,343,258,885	70,284,022	67,272,974,863	99.19	622,152,137
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	78,996,091,000	67,895,127,000	67,343,258,885	70,284,022	67,272,974,863	99.19	622,152,137
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	120,720,312,000	110,280,097,000	109,052,511,467	95,330,773	108,957,180,694	98.89	1,322,916,306
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,338,941,000	6,182,214,000	6,132,900,704	0	6,132,900,704	99.2	49,313,296
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20,000,000	0	0	0	0		0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	117,500,000	31,853,000	22,974,125	0	22,974,125	72.13	8,878,875
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,536,600,000	1,515,652,000	1,508,084,000	0	1,508,084,000	99.5	7,568,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,007,000,000	2,656,019,000	2,597,546,169	0	2,597,546,169	97.8	58,472,831
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,831,958,000	2,996,031,000	2,972,464,088	0	2,972,464,088	99.21	23,566,912
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	16,851,999,000	13,381,769,000	13,233,969,086	0	13,233,969,086	98.9	147,799,914
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,897,507,000	9,565,969,000	9,263,271,396	0	9,263,271,396	96.84	302,697,604

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/23 11:50 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,578,020,000	5,643,649,000	5,630,130,000	30,920,000	5,599,210,000	99.76	44,439,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,153,133,000	1,231,960,000	1,228,040,284	0	1,228,040,284	99.68	3,919,716
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	996,000,000	991,000,000	987,423,705	0	987,423,705	99.64	3,576,295
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	20,000,000	4,456,650	0	4,456,650	22.28	15,543,350
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	30,624,660,000	17,472,578,000	17,113,322,035	30,920,000	17,082,402,035	97.94	390,175,965
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,447,027,000	4,109,621,000	4,027,692,797	0	4,027,692,797	98.01	81,928,203
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	240,000,000	477,000,000	464,682,439	0	464,682,439	97.42	12,317,561
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,130,000,000	305,000,000	297,645,100	0	297,645,100	97.59	7,354,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,817,027,000	4,891,621,000	4,790,020,336	0	4,790,020,336	97.92	101,600,664
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,128,000,000	3,980,521,000	3,975,704,760	0	3,975,704,760	99.88	4,816,240
522112	Belanja Langganan Telepon	312,000,000	84,005,000	79,801,345	0	79,801,345	95	4,203,655
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,289,474,000	6,941,303,000	6,938,709,414	0	6,938,709,414	99.96	2,593,586
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1,000,000	2,510,000	2,505,800	0	2,505,800	99.83	4,200
522131	Belanja Jasa Konsultan	18,867,099,000	10,251,993,000	10,231,895,121	0	10,231,895,121	99.8	20,097,879
522141	Belanja Sewa	61,922,148,000	56,992,634,000	56,906,755,496	0	56,906,755,496	99.85	85,878,504
522151	Belanja Jasa Profesi	9,632,800,000	4,477,363,000	4,278,960,750	0	4,278,960,750	95.57	198,402,250
522191	Belanja Jasa Lainnya	55,243,520,000	79,974,459,000	79,522,974,745	6,940,856	79,516,033,889	99.44	458,425,111
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,548,974,000	183,391,000	173,183,670	0	173,183,670	94.43	10,207,330
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	160,945,015,000	162,888,179,000	162,110,491,101	6,940,856	162,103,550,245	99.52	784,628,755
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,560,000,000	9,130,314,000	9,124,854,040	0	9,124,854,040	99.94	5,459,960
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,977,514,000	3,922,869,000	3,901,435,477	0	3,901,435,477	99.45	21,433,523
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	5,537,514,000	13,053,183,000	13,026,289,517	0	13,026,289,517	99.79	26,893,483
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	21,445,610,000	26,919,571,000	26,655,420,225	19,459,426	26,635,960,799	99.02	283,610,201
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	941,750,000	509,630,000	491,306,980	0	491,306,980	96.4	18,323,020
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,001,519,000	18,196,815,000	17,770,874,712	130,000	17,770,744,712	97.66	426,070,288
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30,933,002,000	41,975,051,000	41,570,708,282	54,149,295	41,516,558,987	99.04	458,492,013
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	85,321,881,000	87,601,067,000	86,488,310,199	73,738,721	86,414,571,478	98.73	1,186,495,522
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	640,865,000	7,670,000,000	7,642,389,790	0	7,642,389,790	99.64	27,610,210
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	12,918,981,000	13,671,482,000	13,533,822,920	4,737,221	13,529,085,699	98.99	142,396,301

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/23 11:50 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	13,559,846,000	21,341,482,000	21,176,212,710	4,737,221	21,171,475,489	99.23	170,006,511
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	318,657,942,000	320,629,879,000	317,938,614,984	116,336,798	317,822,278,186	99.16	2,807,600,814
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,562,140,000	7,603,239,000	7,595,057,862	0	7,595,057,862	99.89	8,181,138
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	300,000,000	22,311,000	22,311,000	0	22,311,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	4,862,140,000	7,625,550,000	7,617,368,862	0	7,617,368,862	99.89	8,181,138
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	600,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	600,000,000	0	0	0	0		0
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	123,000,000	122,100,000	0	122,100,000	99.27	900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	123,000,000	122,100,000	0	122,100,000	99.27	900,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	60,000,000	173,590,000	169,915,300	0	169,915,300	97.88	3,674,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	60,000,000	173,590,000	169,915,300	0	169,915,300	97.88	3,674,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,522,140,000	7,922,140,000	7,909,384,162	0	7,909,384,162	99.84	12,755,838
	JUMLAH BELANJA	444,900,394,000	438,832,116,000	434,900,510,613	211,667,571	434,688,843,042	99.1	4,143,272,958

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 09/05/23 11:50 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan							
2491	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	7,000,000,000	6,401,217,000	6,395,029,670	0	6,395,029,670	99.9	6,187,330
2492	Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal	2,000,000,000	1,804,414,000	1,802,760,969	0	1,802,760,969	99.91	1,653,031
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	5,000,000,000	2,038,579,000	2,031,335,367	4,462,500	2,026,872,867	99.43	11,706,133
2499	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri	1,000,000,000	1,380,297,000	1,380,146,420	0	1,380,146,420	99.99	150,580
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	2,000,000,000	1,826,864,000	1,825,838,655	0	1,825,838,655	99.94	1,025,345
2501	Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil	1,000,000,000	803,414,000	803,369,636	1,070,000	802,299,636	99.86	1,114,364
2503	Koordinasi Kebijakan Fiskal	5,000,000,000	4,601,547,000	4,586,522,966	380,000	4,586,142,966	99.67	15,404,034
2505	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM	1,500,000,000	1,365,750,000	1,360,738,506	320,000	1,360,418,506	99.61	5,331,494
2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	1,500,000,000	1,361,958,000	1,361,953,043	0	1,361,953,043	100	4,957
2511	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	4,500,000,000	4,085,875,000	4,074,491,763	0	4,074,491,763	99.72	11,383,237
2512	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	1,500,000,000	1,361,959,000	1,360,897,581	0	1,360,897,581	99.92	1,061,419
2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	35,500,000,000	46,629,981,000	46,589,557,891	4,010,000	46,585,547,891	99.9	44,433,109
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	2,000,000,000	3,194,404,000	3,192,918,285	0	3,192,918,285	99.95	1,485,715
2516	Koordinasi Kebijakan Pangan	5,000,000,000	4,530,985,000	4,530,575,069	29,716,875	4,500,858,194	99.34	30,126,806
2518	Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	2,000,000,000	1,778,311,000	1,778,122,511	0	1,778,122,511	99.99	188,489
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	3,000,000,000	2,694,024,000	2,692,291,178	0	2,692,291,178	99.94	1,732,822
2520	Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan	2,000,000,000	1,926,558,000	1,917,135,107	5,010,715	1,912,124,392	99.25	14,433,608
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan	2,000,000,000	1,805,196,000	1,804,976,981	2,125,000	1,802,851,981	99.87	2,344,019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 09/05/23 11:50 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2524	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan	1,500,000,000	1,338,952,000	1,338,950,179	0	1,338,950,179	100	1,821
2525	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan	5,000,000,000	4,608,265,000	4,607,193,039	0	4,607,193,039	99.98	1,071,961
2526	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Hortikultura	2,000,000,000	1,810,741,000	1,810,134,781	0	1,810,134,781	99.97	606,219
2527	Koordinasi Kebijakan Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	1,000,000,000	963,300,000	963,042,606	0	963,042,606	99.97	257,394
2528	Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	1,500,000,000	1,343,147,000	1,342,027,937	0	1,342,027,937	99.92	1,119,063
4539	Koordinasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah	5,000,000,000	4,805,525,000	4,804,862,534	0	4,804,862,534	99.99	662,466
4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi	1,000,000,000	903,620,000	903,535,769	0	903,535,769	99.99	84,231
4541	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	1,000,000,000	903,620,000	893,679,312	0	893,679,312	98.9	9,940,688
4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	1,000,000,000	903,620,000	903,327,749	0	903,327,749	99.97	292,251
4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	1,000,000,000	903,620,000	903,491,452	440,000	903,051,452	99.94	568,548
4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	6,000,000,000	5,421,216,000	5,396,565,528	2,000,000	5,394,565,528	99.51	26,650,472
4545	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	1,500,000,000	1,365,486,000	1,364,696,905	0	1,364,696,905	99.94	789,095
4546	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	5,000,000,000	4,494,327,000	4,493,779,003	0	4,493,779,003	99.99	547,997
4547	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	4,000,000,000	3,791,450,000	3,770,201,123	0	3,770,201,123	99.44	21,248,877
4548	Koordinasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Kawasan	1,000,000,000	963,206,000	961,460,193	0	961,460,193	99.82	1,745,807
4549	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	1,000,000,000	963,300,000	961,188,403	0	961,188,403	99.78	2,111,597
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	5,225,000,000	14,755,767,000	13,935,916,084	1,558,000	13,934,358,084	94.43	821,408,916
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	44,000,000,000	22,482,866,000	22,378,759,534	35,200,983	22,343,558,551	99.38	139,307,449
5047	Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus	16,500,000,000	19,458,521,000	19,309,100,006	0	19,309,100,006	99.23	149,420,994
5200	Koordinasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	9,500,000,000	8,441,890,000	8,412,081,263	0	8,412,081,263	99.65	29,808,737

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 09/05/23 11:50 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5227	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	2,000,000,000	1,821,000,000	1,820,251,092	2,550,000	1,817,701,092	99.82	3,298,908
5229	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2,500,000,000	2,276,250,000	2,275,753,554	0	2,275,753,554	99.98	496,446
5266	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	17,500,000,000	15,691,000,000	15,689,920,314	12,545,000	15,677,375,314	99.91	13,624,686
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CL	219,225,000,000	210,002,022,000	208,728,579,958	101,389,073	208,627,190,885	99.394	1,374,831,115
WA	Program Dukungan Manajemen							
2486	Peningkatan Pelayanan Perencanaan	17,120,905,000	13,127,225,000	12,918,924,409	3,600,356	12,915,324,053	98.39	211,900,947
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	4,000,000,000	3,622,454,000	3,614,941,841	4,140,000	3,610,801,841	99.68	11,652,159
2488	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)	194,554,489,000	203,080,382,000	201,087,687,530	96,620,773	200,991,066,757	98.97	2,089,315,243
2489	Pengawasan Inspektorat	1,000,000,000	896,020,000	895,838,650	5,561,047	890,277,603	99.36	5,742,397
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	2,500,000,000	1,231,873,000	799,284,834	356,322	798,928,512	64.85	432,944,488
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	6,500,000,000	6,872,140,000	6,855,253,391	0	6,855,253,391	99.75	16,886,609
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	225,675,394,000	228,830,094,000	226,171,930,655	110,278,498	226,061,652,157	98.838	2,768,441,843
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	444,900,394,000	438,832,116,000	434,900,510,613	211,667,571	434,688,843,042	99.104	4,143,272,958
	JUMLAH	444,900,394,000	438,832,116,000	434,900,510,613	211,667,571	434,688,843,042	99.1	4,143,272,958

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 09/05/23 11:50 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,457,074,326	0	1,457,074,326	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	1,457,074,326	0	1,457,074,326	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	25,989,852	0	25,989,852	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	317,408,495	0	317,408,495	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,850,000	0	1,850,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	345,248,347	0	345,248,347	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	1,802,322,673	0	1,802,322,673	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	1,802,322,673	0	1,802,322,673	

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tanggal : 09/05/23 11:51 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	9,522	83,623,800,130	770	8,704,820,917	48	1,477,372,595	10,244	90,851,248,452
30103	ALAT BANTU	37	1,394,251,104	1	4,862,825	0	0	38	1,399,113,929
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	22	4,365,832,500	9	21,285,000	13	894,410,000	18	3,492,707,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	20	43,721,150	9	21,285,000	0	0	29	65,006,150
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	10	24,317,400	2	23,873,900	0	0	12	48,191,300
30303	ALAT UKUR	11	62,608,940	1	11,800,000	1	11,800,000	11	62,608,940
30501	ALAT KANTOR	1,370	10,368,705,970	82	1,328,670,873	17	230,262,500	1,435	11,467,114,343
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,203	28,573,825,570	410	2,982,615,184	4	97,427,595	5,609	31,459,013,159
30601	ALAT STUDIO	385	5,533,972,662	63	1,832,966,020	1	72,415,000	447	7,294,523,682
30602	ALAT KOMUNIKASI	529	1,367,630,058	36	211,016,850	0	0	565	1,578,646,908
30603	PERALATAN PEMANCAR	7	71,227,200	0	0	0	0	7	71,227,200
30701	ALAT KEDOKTERAN	62	917,203,590	1	1,320,000	1	1,320,000	62	917,203,590
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	10	150,356,800	0	0	0	0	10	150,356,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	4	16,082,000	6	26,480,000	6	26,480,000	4	16,082,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	13,358,400	0	0	0	0	1	13,358,400
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	10,780,000	3	57,276,000	0	0	4	68,056,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	2,510,000	0	0	0	0	1	2,510,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	2	88,850,000	2	88,850,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1,085	19,564,223,505	96	1,735,639,840	2	35,487,500	1,179	21,264,375,845
31002	PERALATAN KOMPUTER	761	11,110,103,281	48	343,670,425	1	18,920,000	808	11,434,853,706
31501	ALAT DETEKSI	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
31503	ALAT SAR	1	3,280,000	0	0	0	0	1	3,280,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	7,810,000	1	13,209,000	0	0	2	21,019,000
134113	Jaringan	2	2,092,285,347	2	379,910,520	2	257,810,520	2	2,214,385,347
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	2,092,285,347	2	379,910,520	2	257,810,520	2	2,214,385,347
135121	Aset Tetap Lainnya	26	547,639,287	0	0	0	0	26	547,639,287
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	401,498,787	0	0	0	0	1	401,498,787
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	5	96,310,500	0	0	0	0	5	96,310,500
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	20	49,830,000	0	0	0	0	20	49,830,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	21	4,702,348,710	7	1,013,411,070	19	4,541,455,000	9	1,174,304,780
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	19	4,541,455,000	4	873,125,000	19	4,541,455,000	4	873,125,000
30501	ALAT KANTOR	1	5,730,450	1	116,765,000	0	0	2	122,495,450
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	1	4,601,070	0	0	1	4,601,070
31002	PERALATAN KOMPUTER	1	155,163,260	1	18,920,000	0	0	2	174,083,260
TOTAL			90,966,073,474		10,098,142,507		6,276,638,115		94,787,577,866

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl.Data : 09/05/23 6:00 AM

Tanggal : 09/05/23 11:51 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	244,937,396
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	80,720,620
117199	Persediaan Lainnya	157,275,132
132111	Peralatan dan Mesin	90,851,248,452
134113	Jaringan	2,214,385,347
135121	Aset Tetap Lainnya	547,639,287
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(72,417,547,997)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(968,793,589)
162151	Software	9,177,718,727
162161	Lisensi	105,187,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,174,304,780
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	8,357,803,515
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,162,628,280)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(7,937,339,352)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(78,890,625)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(7,620,881,015)
J U M L A H		22,725,139,898

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tanggal : 09/05/23 11:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	8,391,100
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	271,150
1010301003	Penjepit Kertas	3,581,390
1010301004	Penghapus/Korektor	1,449,800
1010301005	Buku Tulis	3,009,000
1010301006	Ordner Dan Map	28,956,000
1010301007	Penggaris	156,200
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	954,650
1010301010	Alat Perekat	2,290,630
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	960,000
1010302001	Kertas HVS	29,362,200
1010302002	Berbagai Kertas	21,268,345
1010302003	Kertas Cover	3,570,000
1010302004	Amplop	17,348,250
1010302005	Kop Surat	16,792,500
1010303001	Transparant Sheet	1,490,000
1010304002	Computer File/Tempat Disket	392,181
1010304004	Tinta/Toner Printer	87,361,000
1010304006	USB/Flash Disk	5,610,000
1010306010	Batu Baterai	11,179,000
1010307004	Penutup Tangan	544,000
Jumlah Barang Konsumsi		244,937,396
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	884,200
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	17,445,250
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	437,200
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	7,665,400
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	17,756,400
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	11,975,600
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	24,556,570
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		80,720,620
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair(Persediaan Lainnya)	10,845,868
1010401002	Obat Padat(Persediaan Lainnya)	67,766,269
1010401003	Obat Gas(Persediaan Lainnya)	1,248,084
1010401005	Obat Gel/Salep(Persediaan Lainnya)	3,746,254
1010401006	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)	46,251,657
1010401007	Non Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)	27,417,000
Jumlah Persediaan Lainnya		157,275,132
TOTAL		482,933,148

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 158/25/2022

-----Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (23-03-2022), dimulai pukul lima belas (15:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

--- Rizki Saktiadani Sulistiyono, Sarjana Komputer, NIP 19890930 201502 1 004 ---
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KM.6/2017 tanggal 25 Juli 2017, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-45/KNL.0701/2022 tanggal 07 Maret 2022, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Susiwijono, NIP 19690707 198912 1 001, jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor S-40/SES.M.EKON/01/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-459/WKN.07/KNL.01/2022 tanggal 25 Februari 2022 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-5/MK.6/WKN.07/KNL.01/2022 tanggal 10 Januari 2022. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Yuli Nurhayati, NIP 19880722 201402 2 002 berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor ST-155/SET.M.EKON.4/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta I. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1. 1 (satu) unit sedan Nissan Teana 2.5 CVT A/T, Tahun 2010, Nomor Polisi B 1227 PQA, Nomor Rangka MNTBBUJ32Z0004096, Nomor Mesin VQ25006268K, warna hitam metalik, BPKB No. H05477371, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp72.813.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

2. 1 (satu) unit sedan Nissan Teana 2.5 CVT A/T, Tahun 2010, Nomor Polisi B 1228 PQA, Nomor Rangka MNTBBUJ32Z0004095, Nomor Mesin VQ25006201K, warna hitam metalik, BPKB No. H05477373, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp68.738.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

3. 1 (satu) unit sedan Nissan Teana 2.5 CVT A/T, Tahun 2010, Nomor Polisi B 1229 PQA, Nomor Rangka MNTBBUJ32Z0003918, Nomor Mesin VQ25006041K, warna hitam metalik, BPKB No. H05477372, kondisi rusak berat -----

.../Lembar Kedua

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

Nilai Limit : Rp65.046.000,00 (enam puluh lima juta empat puluh enam ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat).

4. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1959 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G260016603, Nomor Mesin 1TR6238597, warna silver metalik, BPKB No. E0763627G, kondisi rusak berat

Nilai Limit : Rp50.070.000,00 (lima puluh juta tujuh puluh ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat).

5. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1974 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G960014847, Nomor Mesin 1TR6213204, warna silver metalik, BPKB No. E0763868G, kondisi rusak berat

Nilai Limit : Rp47.458.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat).

6. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1969 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G460015498, Nomor Mesin 1TR6221943, warna silver metalik, BPKB No. E0763150G, kondisi rusak berat

Nilai Limit : Rp51.936.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat).

7. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1970 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G460014898, Nomor Mesin 1TR6213636, warna silver metalik, BPKB No. E0763628G, kondisi rusak berat

Nilai Limit : Rp51.789.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat).

8. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1971 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G760016497, Nomor Mesin 1TR6236949, warna silver metalik, BPKB No. E0764174G, kondisi rusak berat

Nilai Limit : Rp48.002.000,00 (empat puluh delapan juta dua ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat).

9. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1972 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G660016314, Nomor Mesin 1TR6234031, warna silver metalik, BPKB No. E0763630G, kondisi rusak berat

Nilai Limit : Rp50.793.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian

Lembar ketiga dari Risalah Lelang Nomor : 158/25/2022 tanggal 23 Maret 2022
Pejabat Lelang

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

10. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1973 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G660015731, Nomor Mesin 1TR6225439, warna silver metalik, BPKB No. E0763629G, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp52.646.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

11. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1960 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G060014610, Nomor Mesin 1TR6209744, warna silver metalik, BPKB No. E0763151G, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp52.254.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

12. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1977 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G960015559, Nomor Mesin 1TR6223056, warna silver metalik, BPKB No. E0763867G, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp51.467.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

13. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1978 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G960016260, Nomor Mesin 1TR6233024, warna silver metalik, BPKB No. E0763866G, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp50.906.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) ---

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

14. 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV A/T, Tahun 2009, Nomor Polisi B 1013 PQH, Nomor Rangka MHRRE18409J800550, Nomor Mesin R20A14909927, warna hitam metalik, BPKB No. F7188001G, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp69.708.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

15. 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV A/T, Tahun 2009, Nomor Polisi B 1014 PQH, Nomor Rangka MHRRE18409J800596, Nomor Mesin R20A14909966, warna hitam metalik, BPKB No. F7188002G, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp70.671.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng

Timur No.2-4,.../Lembar Keempat

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

16. 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV A/T, Tahun 2009, Nomor Polisi B 1016 PQH, Nomor Rangka MHRRE18409J800489, Nomor Mesin R20A14909884, warna hitam metalik, BPKB No. F7187913G, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp74.071.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) -

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

17. 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV A/T, Tahun 2009, Nomor Polisi B 1018 PQH, Nomor Rangka MHRRE18409J800541, Nomor Mesin R20A14909920, warna hitam metalik, BPKB No. F7187848G, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp72.910.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

18. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova V A/T, Tahun 2010, Nomor Polisi B 1133 PQO, Nomor Rangka MHFXW43G0A4052353, Nomor Mesin 1TR6989618, warna hitam metalik, BPKB No. H04717111, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp88.767.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

19. 1 (satu) unit mini bus Nissan Serena CT A/T, Tahun 2010, Nomor Polisi B 1163 PQO, Nomor Rangka C24A36169, Nomor Mesin QR20727553A, warna hitam, BPKB No. H04834117, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp57.188.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Parkiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gd. Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat). -----

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Koran Jakarta tanggal 16 Maret 2022. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

- a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
- b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
- c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- 2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
- a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
- b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
- c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. --
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
- 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
- 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
- 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
- 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
- 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
- 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
- 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
- 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
 2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
- Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
 2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
 2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----
- Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----
- Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang

atau kuasanya.../Lembar Ketujuh

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ---

----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta I. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah seratus sebelas penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1. 1 (satu) unit sedan Nissan Teana 2.5 CVT A/T, Tahun 2010, Nomor Polisi B 1227 PQA, Nomor Rangka MNTBBUJ32Z0004096, Nomor Mesin VQ25006268K, warna hitam metalik, BPKB No. H05477371, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp79.891.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Viera Janviera Roswy, NIK 3175076401720008, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kresna B 4 No. 9 PTB Duren Sawit, RT/RW 004/011, Kel/Desa Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta -----

2. 1 (satu) unit sedan Nissan Teana 2.5 CVT A/T, Tahun 2010, Nomor Polisi B 1228 PQA, Nomor Rangka MNTBBUJ32Z0004095, Nomor Mesin VQ25006201K, warna hitam metalik, BPKB No. H05477373, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp72.999.999,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) -----

Pembeli ----- : Acep Hendra, NIK 3275022907830028, Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Pulo Gede, RT/RW 008/011, Kel/Desa Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat -----

3. 1 (satu) unit sedan Nissan Teana 2.5 CVT A/T, Tahun 2010, Nomor Polisi B 1229 PQA, Nomor Rangka MNTBBUJ32Z0003918, Nomor Mesin VQ25006041K, warna hitam metalik, BPKB No. H05477372, kondisi rusak berat -----

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

Harga Lelang ----- : Rp74.082.100,00 (tujuh puluh empat juta delapan puluh
dua ribu seratus rupiah) -----

Pembeli ----- : Arabinaya Leomin Lumbu Lamba, NIK 5371022108740005,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kel. Sikumana,
RT/RW 004/002, Kel/Desa Sikumana, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur -----

4. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B
1959 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G260016603, Nomor Mesin 1TR6238597,
warna silver metalik, BPKB No. E0763627G, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp55.759.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima
puluh sembilan ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Irwan Lubis, NIK 3173012004760003, Wiraswasta,
beralamat di Interkota C1/12C, RT/RW 012/007, Kel/Desa
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta -----

5. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B
1974 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G960014847, Nomor Mesin 1TR6213204,
warna silver metalik, BPKB No. E0763868G, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp63.699.999,00 (enam puluh tiga juta enam ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan rupiah) -----

Pembeli ----- : Tri Widodo, NIK 3319021606800001, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), beralamat di Dk. Ngronggah, RT/RW 004/009,
Kel/Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah -----

6. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B
1969 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G460015498, Nomor Mesin 1TR6221943,
warna silver metalik, BPKB No. E0763150G, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp69.190.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus
sembilan puluh ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Rubiyanto, NIK 3171030507690004, Tentara Nasional
Indonesia (TNI), beralamat di Jl. Taruna Raya II No. 15,
RT/RW 012/003, Kel/Desa Serdang, Kecamatan
Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta -----

7. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B
1970 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G460014898, Nomor Mesin 1TR6213636,
warna silver metalik, BPKB No. E0763628G, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp85.999.999,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan rupiah) -----

Pembeli ----- : Dwi Wahyuni Kartikawati, Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jl. F Raya No. 7, RT/RW 002/010, Kel/Desa
Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta, kuasa dari PT. Dulangmas Tirta, NIK -,

-, beralamat.../Lembar Kesepuluh

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

_____, beralamat di Jl. F Raya No. 7, RT/RW 002/010, Kel/Desa

Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,

Provinsi DKI Jakarta _____

8. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B
1971 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G760016497, Nomor Mesin 1TR6236949,
warna silver metalik, BPKB No. E0764174G, kondisi rusak berat _____

Harga Lelang _____ : Rp85.999.999,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh

sembilan rupiah) _____

Pembeli _____ : Dwi Wahyuni Kartikawati, Mengurus Rumah Tangga,

beralamat di Jl. F Raya No. 7, RT/RW 002/010, Kel/Desa

Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,

Provinsi DKI Jakarta, kuasa dari PT. Dulangmas Tirta, NIK -,

-, beralamat di Jl. F Raya No. 7, RT/RW 002/010, Kel/Desa

Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,

Provinsi DKI Jakarta _____

9. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B
1972 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G660016314, Nomor Mesin 1TR6234031,
warna silver metalik, BPKB No. E0763630G, kondisi rusak berat _____

Harga Lelang _____ : Rp63.699.999,00 (enam puluh tiga juta enam ratus

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh

sembilan rupiah) _____

Pembeli _____ : Tri Widodo, NIK 3319021606800001, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), beralamat di Dk. Ngronggah, RT/RW 004/009,

Kel/Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah _____

10. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B
1973 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G660015731, Nomor Mesin 1TR6225439,
warna silver metalik, BPKB No. E0763629G, kondisi rusak berat _____

Harga Lelang _____ : Rp68.888.999,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus

delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh

sembilan rupiah) _____

Pembeli _____ : Irfan Purnama, NIK 3273261605920004, Wiraswasta,

beralamat di Sukagalih No. 198, RT/RW 005/006, Kel/Desa

Pasir Jati, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Provinsi

Jawa Barat _____

11. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B
1960 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G060014610, Nomor Mesin 1TR6209744,
warna silver metalik, BPKB No. E0763151G, kondisi rusak berat _____

Harga Lelang _____ : Rp67.890.123,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus

sembilan puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) _____

Pembeli _____ : Arabinaya Leomin Lumbu Lamba, NIK 5371022108740005,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kel. Sikumana,

RT/RW 004/002, Kel/Desa Sikumana, Kecamatan Maulafa,

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

----- Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur -----

12. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1977 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G960015559, Nomor Mesin 1TR6223056, warna silver metalik, BPKB No. E0763867G, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp65.699.999,00 (enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) -----

Pembeli ----- : Tri Widodo, NIK 3319021606800001, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dk. Ngronggah, RT/RW 004/009, Kel/Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah -----

13. 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang Innova E M/T, Tahun 2006, Nomor Polisi B 1978 VQ, Nomor Rangka MHFXW41G960016260, Nomor Mesin 1TR6233024, warna silver metalik, BPKB No. E0763866G, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) -----

Pembeli ----- : Upadi Prono Widhyo Ismoyo, NIK 3404110410770001, Wiraswasta, beralamat di Kemiri, RT/RW 004/002, Kel/Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta -----

14. 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV A/T, Tahun 2009, Nomor Polisi B 1013 PQH, Nomor Rangka MHRRE18409J800550, Nomor Mesin R20A14909927, warna hitam metalik, BPKB No. F7188001G, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) -----

Pembeli ----- : Ria Laela Kurniawati, NIK 3273074202730003, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Gg. H. Ento No. 55/65, RT/RW 002/011, Kel/Desa Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat -----

15. 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV A/T, Tahun 2009, Nomor Polisi B 1014 PQH, Nomor Rangka MHRRE18409J800596, Nomor Mesin R20A14909966, warna hitam metalik, BPKB No. F7188002G, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp91.111.111,00 (sembilan puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) -----

Pembeli ----- : Rudiyanto, NIK 1971050704760001, Wiraswasta, beralamat di Jl. Bukit Permai No. 307, RT/RW 007/002, Kel/Desa Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -----

16. 1 (satu) unit mobil Honda All New CRV A/T, Tahun 2009, Nomor Polisi B 1016 PQH, Nomor Rangka MHRRE18409J800489, Nomor Mesin R20A14909884, warna hitam metalik, BPKB No. F7187913G, kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp100.299.999,00 (seratus juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) -----

Pembeli ----- : Aminta, NIK 1671102006600003, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), beralamat.../Lembar Keduabelas

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 158/25/2022 tanggal 23 Maret 2022

Banyaknya barang yang dilelang: 19 (sembilan belas) _____

Banyaknya barang yang laku/terjual: 19 (sembilan belas) _____

Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp1.457.074.326,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) –

Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) _____

Jumlah harga barang yang ditahan: _____

Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 67 (enam puluh tujuh) _____

Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. _____

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Yuli Nurhayati

NIP 19880722 201402 2 002

Rizki Saktiadani Sulistiyono,
S.Kom.

NIP 19890930 201502 1 004

Saksi II

Saksi I

Ttd.

Ttd.

Naufal Ammarandi

NIP 20000304 202201 1 003

T. Ima Putri Oktavia

NIP 19911013 201411 2 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 29 MAR 2022

Kepala KPKNL Jakarta I



Wildan Ahmad Fananto

NIP 19670513 199303 1 001



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820220329544159
Tanggal Billing : 29-03-2022 14:45:34
Tanggal Kedaluwarsa : 05-04-2022 14:45:34
Tanggal Bayar : 29-03-2022 14:49:02
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga : 035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Eselon I : 01 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Kerja : 427752 - MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Total Disetor : 1.457.074.326 (IDR)
Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000133450
NTPN : C17348N3E0S5NIEV

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 1.457.074.326 (IDR)
Keterangan : HBL RL-158/25/2022 23.03.22 Lelang Kendaraan



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820220329544300
Tanggal Billing	: 29-03-2022 14:46:26
Tanggal Kedaluwarsa	: 05-04-2022 14:46:26
Tanggal Bayar	: 29-03-2022 14:49:03
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 29.141.488 (IDR)
Terbilang	: Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000134048
NTPN	: CAA080N9VHMM2IJC

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 29.141.488 (IDR)
Keterangan	: RL-158/25/2022

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

NOTA DINAS

Nomor: KU/02/SET.M.EKON.2.4/01/2023

Yth. : Kuasa Pengguna Anggaran
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 4550
Hal : Belanja Tunggakan Tahun Anggaran 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 3 Januari 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa pada kegiatan 4550 (Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja) terdapat belanja yang menjadi tunggakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terjadi kelebihan setor TUP tahun anggaran 2022 ke kas negara sebesar Rp 607.110.936 yang kegiatannya telah dilaksanakan serta dokumen SPJ telah tersedia.
2. Dokumen SPJ sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dikoordinasikan dan diverifikasi oleh Biro Umum.
3. Atas hasil koordinasi bersama Biro Umum dan Inspektorat, dengan KPPN Jakarta II, proses penyelesaian tunggakan tersebut dapat diselesaikan melalui belanja tunggakan pada anggaran tahun 2023.
4. Daftar belanja yang menjadi tunggakan pada anggaran tahun 2023 terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Saudara, diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 4550,


Amar Yasir Moestafa

Lampiran Nota Dinas

Nomor : KU/ /SET.M.EKON.2.4/01/2023

Tanggal : 3 Januari 2023

**TUNGGAKAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 PADA KEGIATAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

KODE KEGIATAN	KEGIATAN	NILAI (dalam Rupiah)	PIHAK KE TIGA
4550.PBK.001-B-052-524114	Uang saku konsi rapat persiapan dan pelaksanaan outlook perekonomian Indonesia tahun 2023 (Ritz Carlton 20 sd 21 Desember 2022)	53.070.000	Fery Irawan dkk
4550.PBK.001-B-052-524114	Uang saku konsi rapat strategi komunikasi menjaga resiliensi ekonomi melalui transformasi struktural (Pullman, 22 sd 24 Desember 2022)	41.920.000	I Ktut dkk
4550.PBK.001-B-052-524114	Uang saku konsi kegiatan workshop dimensi informasi publik mendukung implementasi UUCK (Pullman 28 sd 30 Desember 2022)	33.360.000	Susiwijono dkk
4550.PBK.001-B-052-524114	Uang saku konsi rapat pembahasan rencana aksi RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dalam mendukung program pertahanan yang diamanatkan dalam UUCK (27 sd 28 Desember 2022)	13.500.000	Kartika dkk
4550.PBK.001-B-052-524114	Uang saku konsi rapat pembahasan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait UUCK (29 sd 31 Desember 2022)	40.020.000	I Ktut dkk
4550.PBK.001-B-052-522151	Honor narasumber kegiatan rapat pembahasan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait UUCK (29 sd 31 Desember 2022)	15.000.000	Agus Kurniawan dkk
4550.PBK.001-B-052-521211	Pengadaan seminar kit rapat koordinasi rancangan penetapan PITT ketidaksesuaian ijin konsensi dan hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan amanat UUCK (30 Desember 2022)	9.000.000	PT. Ridho Karya Tauhidi

KODE KEGIATAN	KEGIATAN	NILAI (dalam Rupiah)	PIHAK KE TIGA
4550.PBK.001-B-052-521211	Pengadaan cetak buku Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (31 Desember 2022)	85.042.650	CV. Waru Jaya Printing
4550.PBK.001-A-052-522191	Pengadaan jasa penayangan di media cetak nasional The Jakarta Post terkait artikel optimisme Indonesia menghadapi tantangan ekonomi 2023, menjaga resiliensi ekonomi Indonesia melalui transformasi struktural implementasi UUCK (29 Desember 2022)	137.022.840	PT. Bina Media Tenggara (The Jakarta Post)
4550.PBK.001-A-052-522191	Pengadaan jasa penayangan media nasional Rakyat Merdeka terkait artikel optimisme Indonesia menghadapi tantangan ekonomi 2023, menjaga resiliensi ekonomi Indonesia melalui transformasi struktural implementasi UUCK (30 Desember 2022)	93.461.446	PT. Wahana Ekonomi Semesta (Rakyat Merdeka)
4550.PBK.001-A-052-522191	Pengadaan jasa penayangan media cetak nasional di Harian Bisnis Indonesia terkait artikel optimisme Indonesia menghadapi tantangan ekonomi 2023, menjaga resiliensi ekonomi Indonesia melalui transformasi struktural implementasi UUCK (30 Desember 2022)	85.714.000	PT. Jurnalindo Aksara Grafika (Bisnis Indonesia)

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BA 035)
TAHUN 2022
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2022 (AUDITED)

Nomor : NKF-001/035/PB.6/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 10 April 2023, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA 035) Tahun 2022**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas **Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA 035) Tahun 2022** dan untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2022 (Audited)**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Neg). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka kami menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara) **paling lambat tanggal 10 Mei 2023**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian



Akhmad Hisyam

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



I Ketut Arimbawa

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Nur Abdul Haris

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK

Juli Arikson E.G.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kode Bagian Anggaran : 035

Uraian Bagian Anggaran : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

URAIAN	REALISASI UNAUDITED	KOREKSI		REALISASI AUDITED
		DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5
Pendapatan Perpajakan	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.802.322.673	-	-	1.802.322.673
Pendapatan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan dari KND	-			-
Pendapatan PNBP Lainnya	1.802.322.673			1.802.322.673
Pendapatan BLU	-			-
Pendapatan Hibah	-			-
TOTAL PENDAPATAN	1.802.322.673	-	-	1.802.322.673
Belanja Pegawai	108.957.180.694		-	108.957.180.694
Belanja Barang	317.822.278.186			317.822.278.186
Belanja Modal	7.909.384.162			7.909.384.162
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-			-
Belanja Subsidi	-			-
Belanja Hibah	-			-
Belanja Bantuan Sosial	-			-
Belanja Belanja Lain-lain	-			-
TOTAL BELANJA	434.688.843.042	-	-	434.688.843.042
Dana Perimbangan	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-			-
Dana DIY	-			-
Dana Otonomi Khusus	-			-
Dana Desa	-			-
TOTAL TKDD	-	-	-	-
Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	-
Pembiayaan Luar Negeri	-			-
TOTAL PEMBIAYAAN		-	-	-

Kementerian/Lembaga

Kementerian Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan



Akhdad Hisyam



Nur Abdul Haris

Juli Arikson E.G.

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 BA : 035

	UNAUDITED	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	-			-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-			-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-			-
Pendapatan Cukai	-			-
Pendapatan Pajak Lainnya	-			-
Pendapatan Bea Masuk	-			-
Pendapatan Bea Keluar	-			-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Penerimaan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-			-
Pendapatan Badan Layanan Umum	-			-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	-	-
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	-			-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	-	-	-	-
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	108.618.302.334			108.618.302.334
Beban Persediaan	4.457.875.547			4.457.875.547
Beban Barang dan Jasa	212.343.338.230			212.343.338.230
Beban Pemeliharaan	13.140.816.799		11.821.500	13.128.995.299
Beban Perjalanan Dinas	107.732.136.167			107.732.136.167
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.220.362.973			1.220.362.973
Beban Bunga	-			-
Beban Subsidi	-			-
Beban Hibah	-			-
Beban Bantuan Sosial	-			-
Beban Transfer	-			-
Beban Lain-lain	-			-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.728.415.373	2.364.300		9.730.779.673
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	- 401.056			- 401.056
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	457.240.846.367	2.364.300	11.821.500	457.231.389.167
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	- 457.240.846.367	- 2.364.300	- 11.821.500	- 457.231.389.167
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.457.074.326			1.457.074.326
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-			-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	1.457.074.326	-	-	1.457.074.326
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	226.474.852			226.474.852
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15.400.000			15.400.000
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	211.074.852	-	-	211.074.852
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.668.149.178	-	-	1.668.149.178
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-			-
Beban Luar Biasa	-			-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	- 455.572.697.189	- 2.364.300	- 11.821.500	- 455.563.239.989

Jakarta, April 2023
 Kementerian/Lembaga

Akhmad Hisyani

Ditjen Kekayaan Negara

I Ketut Arimbawa

Nur Abdul Haris

Badan Pemeriksa Keuangan

Juli Arikson E.G.

LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2022
PER 31 DESEMBER 2022

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : NKF-001/035/PB.6/2023
Tanggal : 10 April 2023

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
BA : 035

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	19.116.114.279			19.116.114.279
SURPLUS/DEFISIT LO	(455.572.697.189)	(2.364.300)	(11.821.500)	(455.563.239.989)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
Penyesuaian Nilai Aset	-			-
Koreksi Nilai Persediaan	-			-
Selisih Revaluasi Aset	-			-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(115.924.476)			(115.924.476)
Koreksi Atas Reklasifikasi	-			-
Koreksi Lain-lain	-			-
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	(115.924.476)	-	-	(115.924.476)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS				
Ditagikan ke Entitas Lain	434.688.843.042			434.688.843.042
Diterima dari Entitas Lain	(1.802.322.673)			(1.802.322.673)
Transfer Keluar	(1.067.340.761)			(1.067.340.761)
Transfer Masuk	1.400.000			1.400.000
Pengesahan Hibah Langsung	22.094.322.778			22.094.322.778
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-			-
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-			-
Setoran Surplus BLU	-			-
Transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	-			-
JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	453.914.902.386	-	-	453.914.902.386
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	(1.773.719.279)	(2.364.300)	(11.821.500)	(1.764.262.079)
EKUITAS AKHIR	17.342.395.000	(2.364.300)	(11.821.500)	17.351.852.200

Jakarta, 10 April 2023
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Akhmad Hisyam

Ditjen Kekayaan Negara,

Ketut Arimbawa

Badan Pemeriksa Keuangan,

Juli Arikson E.G.

Ditjen Perbendaharaan,

Nur Abdul Hamid

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2022
PER 31 DESEMBER 2022

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : NKF-001/035/PB.6/2023
Tanggal : 10 April 2023

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
BA : 035

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-			-
Kas di Bendahara Penerimaan	-			-
Kas Lainnya dan Setara kas	44.062.407			44.062.407
Kas pada BLU	-			-
Investasi Jangka Pendek BLU	-			-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	71.841.633			71.841.633
Uang Muka Belanja (prepayment)	-			-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-			-
Piutang Perpajakan	-			-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-			-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	8.358.819			8.358.819
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	(41.795)			(41.795)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	8.317.024	-	-	8.317.024
Bagian Lancar TPA	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-			-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	-			-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	-			-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	482.933.148			482.933.148
Jumlah Aset Lancar	607.154.212	-	-	607.154.212
ASET TETAP				
Tanah	-			-
Peralatan dan Mesin	91.852.838.022	11.821.500	1.013.411.070	90.851.248.452
Gedung dan Bangunan	-			-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.214.385.347			2.214.385.347
Aset Tetap Lainnya	547.639.287			547.639.287
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Aset Konsepsi Jasa	-			-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(73.416.918.267)	999.370.270		(72.417.547.997)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-			-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(968.793.589)			(968.793.589)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-			-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsepsi Jasa	-			-
Jumlah Aset Tetap	20.229.150.800	1.011.191.770	1.013.411.070	20.226.931.500
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi	-			-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-			-
Jumlah Properti Investasi	-	-	-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-			-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	-			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-			-
Aset Tak Berwujud	9.198.453.727	84.452.500		9.282.906.227
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-			-
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	-			-
Dana Penjaminan	-			-
Dana Kelolaan BLU	-			-
Aset Lain-lain	8.603.149.725	1.013.411.070	84.452.500	9.532.108.295
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Pihak Ketiga	-			-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-			-
Akum. Penyusutan AT yg TDK digunakan	(160.893.710)		1.001.734.570	(1.162.628.280)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(7.931.777.477)		84.452.500	(8.016.229.977)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(7.705.333.515)	84.452.500		(7.620.881.015)
Jumlah Aset Lainnya	2.003.598.750	1.182.316.070	1.170.639.570	2.015.275.250
JUMLAH ASET	22.839.903.762	2.193.507.840	2.184.050.640	22.849.360.962
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5.489.227.155			5.489.227.155
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-			-
Pendapatan Diterima Dimuka	-			-
Hibah Yang Belum Disahkan	-			-
Uang Muka dari KP/PN	-			-
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.281.607			8.281.607
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.497.508.762	-	-	5.497.508.762
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-			-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-			-
Kewajiban Konsepsi Jasa	-			-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-			-
JUMLAH KEWAJIBAN	5.497.508.762	-	-	5.497.508.762
EKUITAS	17.342.395.000	(2.364.300)	(11.821.500)	17.351.852.200
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22.839.903.762	(2.364.300)	(11.821.500)	22.849.360.962

Jakarta, April 2023
Kementerian/Lembaga,

Achmad Hisyam

Ditjen Kekayaan Negara,

I Ketut Arimbawa

Badan Pemeriksa Keuangan,

Juli Anisori, G.

Ditjen Perbendaharaan,

Nur Abdul Harris

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat
Kode Pos 10710
Telp : (021) 3522003
Fax : (021) 3511467
Web : www.ekon.go.id

